PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Kasus Pada Perusahaan yang *Listing* di Jakarta Islamic Index Tahun 2015-2020)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
Dalam Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

DESI PUSPITASARI SETIANINGSIH
1705046100

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Puspitasari Setianingsih
NIM : 1705046100
Jurusan : Akuntansi Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi mengenai materi yang pernah ditulis atau telah diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini juga tidak berisi mengenai pikiran-pikiran orang lain, kecuali adanya informasi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2021

Deklator

Desi Puspitasari Setianingsih

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp./Fax. :(024) 7608454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Desi Puspitasari Setianingsih

NIM : 1705046100

Judul : "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan yang *Listing* di Jakarta Islamic Index Tahun 2015-2020)"

Telah dimunaqasyahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta dinyatakan telah lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 29 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana (Strata satu/S1) pada Ilmu Akuntansi Syariah.

Semarang, 12 Juli 2021

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Choirul Huda. M.Ag.	**Dessy Noor Farida, SE., M.Si., A.kt.**
NIP.19760109 200501 1 002	**NIP. 19791222 20103 2 001**
Penguji Utama I	Penguji Utama II
Dr. A.Turmudi, SH., M.Ag.	**Prof. Dr. H. Mujiyono, M.A.**
NIP. 19690708 200501 1 004	**NIP. 19590215 198503 1 005**
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., A.kt.	**Dessy Noor Farida, SE., M.Si., A.kt.**
NIP. 19800128 200801 1 020	**NIP. 19791222 20103 2 001**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Desi Puspitasari Setianingsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim skripsi mahasiswa:

Nama : Desi Puspitasari Setianingsih
NIM : 1705046100
Judul : **Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan yang *Listing* di Jakarta Islamic Index Tahun 2015-2020)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., A.kt.,	**Dessy Noor Farida, SE., M.Si., A.kt**
NIP: 19800128 200801 1 010	**NIP: 19791222 20103 2 001**

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Bismillahi Walhamdulillah, Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapa saya tercinta Bawon dan Mamah saya tercinta Tureni, sebagai wujud rasa terimakasih atas semua pengorbanan dan jerih payah yang telah kalian lakukan sehingga penulis dapat menggapai cita-cita. Kelak cita-cita penulis ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk mamah dan bapa, dan semoga dapat membuat kalian bangga dengan salah satu pencapaian anakmu ini.

MOTTO

Al-Hikmah
وَفَاءُ الضَّرِيْبَةِ مِنَ الأِ يْمَانِ
The Real Mukmin Is Obey the Taxes
Muslim Sejati Taat Pajak
By
Prof.DR.Mujiyono Abdillah,MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan sesuatu yang mendasar dalam sebuah skripsi, mengingat dalam keseharian banyak ungkapan yang menggunakan Bahasa Arab, seperti nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya, mulanya disusun menggunakan huruf Arab kemudian direplikasi menjadi huruf Latin. Transliterasi dalam penelitian ini menggunakan Surat Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor.158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Untuk menjamin konsistensi, sehingga perlu ditetapkannya suatu pedoman transliterasi sebagai berikut

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	*b*	-
ت	Ta’	*t*	-
ث	Śa’	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	*j*	-
ح	Ha’	*ḥa’*	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	*kh*	-
د	Dal	*d*	-
ذ	Zal	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	*r*	-
ز	Zai	*z*	-
س	Sin	*s*	-
ش	Syin	*sy*	
ص	Sad	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za’	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gayn	*g*	-
ف	Fa’	*f*	-
ق	Qaf	*q*	-
ك	Kaf	*k*	-

ل	Lam	*l*	-
م	Mim	*m*	-
ن	Nun	*n*	-
و	Wa	*w*	-
ه	Ha	*h*	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	*y*	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab mirip dengan vokal bahasa Indonesia, karena terdiri dari vokal tunggal, vokal monofonik, dan vokal rangkap/diftong. Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat. Berikut translasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	a
ِ	Kasroh	i
ُ	Dhomah	u

Vokal rangkap atau diftong dalam bahasa Arab merupakan perpaduan harakat dan huruf, berikut translasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
آو	Fathah dan wau	Au	A dan U

3. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab, *Syaddah* disimbolkan dengan tanda (ّ). Sedangkan dalam transliterasi pada huruf yang ada *syaddah*nya dibaca dengan pengulangan huruf (konsonan ganda), misalnya **الطب** dibaca *al-thib*.

4. Ta’Marbutah

Translasi *ta’ marbutah* dibagi menjadi dua macam, berikut translasi dari *ta’ marbutah*:

a. Ta’, apabila dimatikan atau mendapatkan harakat sukun, literasinya ditulis. Misal **حِكْمَةْ** dibaca *hikmah*

b. Ta’, apabila dirangkai dengan kata lain dan dihidupkan, atau diberikan harakat fathah, kasrah atau dhomah, maka translasinya dibaca t. Misal **زكاة الفطري** dibaca *zakat al-fitr*.

5. Kata Sandang

Kata sandang (…ال) ditulis dengan *al*-... misal الصناعة dibaca *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat.

6. Huruf Kapital

Bahasa Arab tidak mengenal adanya penulisan huruf kapital. Dalam transliterasinya, huruf-huruf tersebut dapat diatur, terutama dalam hal penggunaan huruf kapital agar sesuai dengan pedoman umum Bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital biasanya digunakan ketika menuliskan nama orang, tempat, bulan, ataupun sebagai huruf utama di awal kalimat. Apabila huruf (Al) sebelum awal kalimat, maka harus ditulis kapital. Namun, apabila menjadi judul referensi maka harus ditulis menggunakan huruf kapital. Misal, ال غزل dibaca *Al-Ghazali.*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of profitability, firm size and corporate governance on tax avoidance. The independent variables in this study consist of profitability which is proxied by return on assets (ROA), company size is proxied by SIZE, corporate governance is proxied by institutional ownership, the proportion of independent commissioners, and the audit committee. While the dependent variable in this study is tax avoidance proxied by the cash effective tax rate (CETR).

The population in this study are companies listed in the Jakarta Islamic Index (JII) in 2015-2020 as many as 55 companies. The sample in this study amounted to 48 observational data obtained from 8 companies for 6 years, using purposive sampling method based on certain criteria. The data used in this study are secondary data obtained from the website of the Indonesia Stock Exchange (IDX) or the website of each company, as well as the analytical method used in this study using multiple linear regression analysis.

The results of the regression test in this study prove that profitability, institutional ownership, and the proportion of independent commissioners have no effect on tax avoidance. Meanwhile, firm size has a positive effect on tax avoidance, and the audit committee has a negative effect on tax avoidance.

Keywords : Profitability, Firm Size, Institutional Ownership, Proportion Independent Commissioner, Audit Committee, Tax Avoidance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari profitabilitas yang di proksi dengan *return on assets* (ROA), ukuran perusahaan yang diproksi dengan *SIZE*, *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan komite audit. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance* diproksi dengan *cash effective tax rate* (CETR).

Populasi dalam penelitian adalah perusahaan yang *listing* di Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2015-2020 sebanyak 55 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 48 data observasi yang diperoleh dari 8 perusahaan selama 6 tahun dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) atau website masing-masing perusahaan, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil dari uji regresi pada penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, *Tax Avoidance*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rezeki, serta karunia-Nya kepada penulis. Hingga pada akhirnya penulis menyelasaikan skripsi ini dengan judul **"Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Listing di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2015-2020)"**. Penulisan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selama pembuatan skripsi ini, penulis menyadari menerima banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanti, SE., M.Si., Akt. CA, CPA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan juga selaku dosen Pembimbing I.
4. Ibu Dessy Noor Farida, SE., M.Si.,Akt selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran, arahan, dan bimbingannya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu serta bimbingan yang telah ibu berikan.
5. Kedua orang tuaku, Bawon dan Tureni yang senantiasa mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah dilakukan oleh semua pihak, *Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alamin*.

Semarang

Penulis

Desi Puspitasari Setianingsih

DAFTAR ISI

DEKLARASI ..... **i**
PENGESAHAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PERSEMBAHAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vi**
ABSTRACT ..... **ix**
ABSTRAK ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**
2.1 Landasan Teori 9
2.1.1 *Agency Theory* 9
2.1.2 Profitabilitas 10
2.1.3 Ukuran Perusahaan 14
2.1.4 *Corporate Governance* 15
2.1.5 *Tax Avoidance* 23
2.2 Penelitian Terdahulu 27
2.3 Hipotesis Penelitian 32
2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* 32
2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* 33
2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* 34
2.3.4 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* 34
2.3.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* 35
2.4 Kerangka Pemikiran 37

BAB III METODE PENELITIAN 38
3.1 Jenis dan Sumber Data 38
3.2 Populasi dan Sampel 38
3.3 Metode Pengumpulan Data 39
3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran 39
3.4.1 Variabel Dependen 39
3.4.2 Variabel Independen 39
3.5 Teknik Analisis Data 42
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 42
3.5.2 Uji Asumsi Klasik 42
3.5.3 Pengujian Hipotesis 44
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 46
4.1 Hasil Pengumpulan Data 46
4.2 Analisis Statistik Deskriptif 47
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 49
4.3.1 Hasil Uji Normalitas 49
4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas 52
4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi 53
4.3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 54
4.4 Pengujian Hipotesis 55
4.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda 55
4.4.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2) 57
4.4.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 58
4.4.4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T) 59
4.5 Pembahasan Hipotesis 61
4.5.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* 62
4.5.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* 63
4.5.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* 64
4.5.4. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* 65
4.5.5. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* 66
BAB V PENUTUP 68
5.1 Kesimpulan 68
5.2 Keterbatasan Penelitian 69
5.3 Saran 69

5.4 Implikasi Penelitian 70
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN-LAMPIRAN 76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019 1
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 27
Tabel 3. 1 Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi 43
Tabel 4. 1 Pemilihan Sampel Berdasarkan Kriteria yang Telah Ditentukan 46
Tabel 4. 2 Daftar Perusahaan yang Memenuhi Kriteria 47
Tabel 4. 3 Tabel Statistik Deskriptif 47
Tabel 4. 4 One Sample Kolmogorov Smirnov Test 52
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinierity 53
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi 54
Tabel 4. 7 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 56
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2) 58
Tabel 4. 9 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 59
Tabel 4. 10 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....37
Gambar 4. 1 Uji Normalitas: Grafik Histogram 50
Gambar 4. 2 Uji Normalitas: Grafik Normal P-Plot.....51
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Variabel Profitabilitas (ROA) 76
Lampiran 2 Data Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) 77
Lampiran 3 Data Variabel Kepemilikan Institusional 79
Lampiran 4 Data Variabel Proporsi Komisaris Independen 81
Lampiran 5 Data Variabel Komite Audit 82
Lampiran 6 Data Variabel *Tax Avoidance* (CETR) 84
Lampiran 7 Sampel yang digunakan 86

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan Negara Republik Indonesia berasal dari berbagai macam sektor, baik itu sektor internal maupun eksternal. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor internal, sedangkan sektor eksternal yaitu berupa pinjaman luar negeri. Di Indonesia, sektor pajak masih menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan sumbangsih terbesar untuk APBN yang nantinya digunakan untuk membiayai seluruh belanja pemerintah.[1] Tinggi atau rendahnya pajak yang diterima, merupakan suatu indikator dari kemandirian pembangunan suatu bangsa.[2] Berikut merupakan realisasi penerimaan negara baik itu bersumber dari pajak, bukan pajak dan hibah selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1. 1

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2019

(dalam milyaran rupiah)

Sumber Penerimaan	2017	%	2018	%	2019	%
Pajak	1.343.529,84	80,62%	1.518.789,77	78,14%	1.546.141,89	78,86%
Bukan Pajak	311.216,25	18,68%	409.320,24	21,06%	408.994,34	20,86%
Hibah	11.629,81	0,7%	15.564,86	0,8%	5.497,34	0,28%

Sumber: Kementrian Keuangan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, sumber penerimaan terbesar masih dipegang oleh sektor pajak. Perolehan pajak setiap tahunnya memiliki persentase diatas 75% dari seluruh total penerimaan negara. Hal ini menjadi bukti bahwa pajak mempunyai peranan yang amat penting dalam memenuhi kebutuhan negara serta berperan dalam memajukan pembangunan dalam negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pajak diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi wajib pajak terhadap negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung serta untuk

[1] Eka Murni Lusiana Wati and Susi Astuti, 'Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2.4 (2020), 641–54 (p. 641)

[2] Jeri Chomarus Ritonga, 'Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2017', 2019, pp. 1–22 (p. 1).

kepentingan negara bagi kesejahteraan masyarakat.[3] Membayar pajak merupakan bentuk konsistensi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara, secara tidak langsung wajib pajak ikut berpartisipasi dalam pembiayaan dan pembangunan nasional.[4]

Sedangkan pajak dalam Islam disebut dengan *dharibah* yang mempunyai maksud mawajibkan, menetapkan, dan menentukan. Dikatakan sebagai beban karena hal ini merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya dirasakan seperti beban. Adapun menurut bahasa *dharibah* merupakan harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu pendapatan negara. Adapun *kharaj* merupakan pajak yang obyeknya berupa tanah dengan non-muslim sebagai subyeknya, sedangkan *jizyah* merupakan pajak yang obyeknya berupa jiwa dengan non-muslim sebagai subyeknya.[5] Istilah pajak dalam Islam baru dikenal pada 9 H, ketika Nabi Muhammad masih hidup pajak hanya sebatas pada orang-orang dzimmi dan Ahlul Kitab yang ditaklukkan dalam peperangan. Adapun diwajibkannya penarikan pajak dilatarbelakangi pada Al-Qur'an surat At-Taubah Ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk."

Ayat diatas menjelaskan mengenai kewajiban membayar zakat dalam Islam, kemudian dari ayat diatas dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang mewajibkan seluruh penduduk yang tunduk dibawah kekuasaan pemerintah Islam untuk membayar pajak. Kemudian hasil dari penarikan pajak itu digunakan untuk membayar gaji kepada pejabat pemerintah dan jajarannya. Penarikan pajak ini dilakukan oleh Umar bin Khattab setelah kerajaan Persia ditaklukan oleh

[3] Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2018), p. 3.

[4] Moses Dicky Saputra; Nur Fadjrih Asyik, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance.', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.8 (2017), 1–19 (p. 2).

[5] Dedi, 'Konsep Kewajiban Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam', *Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 5.2 (2017), 205–18 (p. 206).

tentara Islam, maka dari sanalah beliau mempelajari sistem perpajakan yang telah berlaku di negeri itu kemudian di seluruh wilayah pemerintah Islam.[6]

Agar pemungutan pajak dapat berjalan secara optimal, perlu adanya kesadaran dari masyarakat dalam membayar pajak. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dalam pemungutan pajak seperti masyarakat enggan untuk membayar pajak atau yang biasa disebut dengan perlawanan pasif, sedangkan perlawanan aktif berupa usaha wajib pajak dalam memanfaatkan kekurangan yang termuat dalam undang-undang *(tax avoidance)* ataupun menggelapkan pajak dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan *(tax evasion)*.[7]

Menurut negara, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang sangat penting, sebab dana yang berasal dari pajak nantinya digunakan untuk membiayai seluruh belanja negara, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bunga utang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain. Sedangkan menurut perusahaan, pajak yaitu suatu tanggungan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemerintah, kemudian mengakibatkan pendapatan bersih perusahaan dalam satu periode mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan hasrat, terlebih wajib pajak badan yang berupaya untuk meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada negara baik itu secara legal maupun terlarang.[8]

Terdapat tiga macam kegiatan yang dilakukan untuk menekan beban pajak yang dibebankan kepada perusahaan atas laba bersih yang dihasilkan, yaitu *tax evasion* (penggelapan pajak), *tax avoidance* (penghindaran pajak), dan *tax saving*. *Tax evasion* (penggelapan pajak) yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang terutang kepada pemerintah dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan usaha penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan secara legal serta tidak melanggar peraturan perpajakan dengan cara memanfaatkan celah di dalam peraturan perpajakan.[9] *Tax avoidance* dianggap legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan karena perusahaan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan *tax saving* merupakan upaya meminimalkan beban pajak dengan cara tidak melakukan pembelian barang yang berpotensi dipungut pajak oleh fiskus.[10]

Berdasarkan uraian diatas ditemukan beberapa contoh kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia seperti yang dilakukan oleh salah satu produsen serta

[6] Dedi, p. 211.

[7] Mardiasmo, pp. 10–11.

[8] Erly Suandy, *Perencanan Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), pp. 1–2.

[9] DEANNA PUSPITA and MEIRISKA FEBRIANTI, 'Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19.1 (2018), 38–46 (p. 39)

[10] Irwan; Michell Suharli Wisanggeni, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), p. 5.

distributor minuman non-alkohol siap minum pada tahun 2014, PT Coca-Cola Indonesia melakukan penghindaran pajak *(tax avoidance)* dengan cara memperbesar biaya iklan, hal ini mengakibatkan laba bersih yang diperoleh lebih kecil, sehingga pajak yang dibayarkan juga lebih kecil. Selanjutnya yaitu perusahaan rokok raksasa yang ada di Indonesia yaitu PT Bentoel International Investama melakukan kegiatan penghindaran pajak. Menurut laporan yang dirilis oleh Lembaga Tax Justice Network pada tahun 2019 British American Tobacco (BAT) yang merupakan perusahaan tembakau, diduga melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel International Investama melalui pinjaman intra-perusahaan yang dilakukan pada tahun 2013-2015 dari perusahaan afiliasi yang ada di Belanda yaitu Rothmans Far East BV. Pinjaman utang ini digunakan untuk pembelian mesin serta peralatan dan juga untuk pembiayaan kembali utang bank. Bunga yang muncul akibat hutang akan menurunkan penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Berdasarkan strategi tersebut, Indonesia kehilangan pendapatan yang berasal dari pajak sebesar US$ 11 juta per tahunnya.[11]

Berdasarkan kasus penghindaran pajak *(tax avoidance)* diatas, terdapat penelitan terdahulu yang mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan *tax avoidance*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020), Eka Murni Lusiana Wati dan Susi Astuti (2020), Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadjrih Asyik (2017), Siti Nur Faizah dan Vidya Vitta Adhivinna (2017), Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah (2017), Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh W (2018), Deanna Puspita dan Meiriska Febrianti (2017), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Ulfa Jasmine (2017), Farid Addy Sumantri, Rr Dian Anggraeni, Agus Kusnawan (2018), Ahmad Waluya Jati, Ihyaul Ulum dan Cahyo Utomo (2019), Vivi Oktavia, Ulfi Jefri dan Jaka Wijaya Kusuma (2020), Sri Mulyani, Anita Wijayanti, Endang Masitoh (2018), Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka (2018). Berdasarkan penelitian terdahulu, faktor yang menjadi pengaruh kegiatan penghindaran pajak *(tax avoidance)* yaitu *leverage*, profitabilitas, kinerja keuangan, *corporate governance*, *corporate social responsibility*, serta ukuran perusahaan.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa kegiatan penghindaran pajak *(tax avoidance)* disebabkan oleh profitabilitas, penelitian ini dilakukan oleh Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020) & Eka Murni Lusiana Wati dan Susi Astuti (2020), faktor *leverage* yang diteliti oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), faktor ukuran perusahaan yang diteliti oleh Deanna Puspita dan Meiriska Febrianti (2017) & Ulfa Jasmine (2017), faktor

[11] ortax, 'Raksasa Rokok Menghindar Pajak RI', *Ortax.Org* (Jakarta, 2019) <https://ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=16551&q=&hlm=>.

corporate governance yang diteliti oleh Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadjrih Asyik (2017), faktor *corporate social responsibility* yang diteliti oleh Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah (2017) dan faktor kinerja keuangan yang diteliti oleh Ahamad Waluya Jati, Ihyaul Ulum dan Cahyo Utomo (2019).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap profitabilitas perusahaan, ditemukan hasil yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilaksanakan oleh Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020) menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kegiatan *tax avoidance*. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Eka Murni Lusiana Wati dan Susi Astuti (2020); Deanna Puspita dan Meiriska Febrianti (2017) memberikan hasil bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap kegiatan penghindaran pajak. Akan tetapi penelitian yang dilaksanakan oleh Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadjrih Asyik (2017); Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh W (2018) memberikan hasil bahwa variabel profitabilitas tidak mempengaruhi kegiatan *tax avoidance*.

Selain profitabilitas, terdapat variabel lain yang berpengaruh terhadap kegiatan *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan. Seperti penelitian yang dilaksanakan oleh Siti Nur Faizah dan Vidya Vitta Adhivinna (2017) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal serupa yang dilakukan oleh Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh W (2018); Vivi Oktavia, Ulfi Jefri dan Jaka Wijaya Kusuma (2020); Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah (2017) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghidaran pajak (*tax avoidance*). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Deanna Puspita dan Meiriska Febrianti (2017); Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017); Ulfa Jasmine (2017) mengatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak *(tax avoidance).*

Berdasarkan studi beberapa riset yang telah dilakukan sebelumnya, ternyata belum menunjukkan hasil yang stabil. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020) yang meneliti "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak", dengan lokasi penelitian di BEI Tahun 2016-2018 (3 tahun penelitian). Populasi yang digunakan yaitu perusahaan sektor industri barang konsumsi. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel profitabilitas serta ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan *leverage* berpengaruh negatif.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti memperpanjang tahun pengamatan menjadi 6 tahun, serta memperbaharui tahun penelitian yaitu dimulai pada tahun 2015 sampai 2020, hal ini sesuai dengan saran yang diberikan oleh Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020). Kemudian, peneliti juga mengganti lokasi penelitian menjadi perusahaan yang menerbitkan sahamnya di Jakarta Islamic Index pada tahun 2015-2020. Penggunaan JII sebagai objek penelitian, hal ini disebabkan karena perusahaan yang menerbitkan saham di JII termasuk kedalam kriteria saham syariah serta peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan yang terdaftar di JII serta menerbitkan saham syariah terindikasi melakukan kegiatan penghindaran pajak atau tidak. Selain itu, variabel independen *leverage* tidak dipakai dalam penelitian ini, melainkan diganti dengan variabel independen *corporate governance* yang di proksi dengan kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan komite audit untuk menjawab saran dari Ulfa Jasmine (2017).

Peneliti menggunakan *cash effective tax rate* sebagai pengukuran penghindaran pajak *(tax avoidance)* sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Eneksi Murni Lusiana Wati dan Susi Astuti (2020), menggunakan *Return On Assets* (ROA) sebagai pengukuran profitabilitas menurut Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadjrih Asyik (2017), dan mengkombinasikan proksi *corporate governance* menurut Eka Murni Lusiana Wati dan Susi Astuti (2020) yang menggunakan Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional serta Farid Addy Sumantri, Rr Dian Anggraeni, Agus Kusnawan (2018) yang menggunakan Komite Audit.

Tujuan Penelitian ini yaitu dapat memberikan hasil yang lebih kuat serta lebih konsisten terkait penelitian terdahulu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini mengangkat judul **"PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Kasus pada Perusahaan yang *listing* di Jakarta Islamic Index Tahun 2015-2020)".**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apakah profitabilitas berpengaruh terdahadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di JII tahun 2015-2020 ?

1.2.2 Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di JII tahun 2015-2020?

1.2.3 Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di JII tahun 2015-2020?

1.2.4 Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di JII tahun 2015-2020?

1.2.5 Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di JII tahun 2015-2020?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengalisa pengaruh profitabitas terdahadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di JII tahun 2015-2020.
2. Mengalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di JII tahun 2015-2020.
3. Mengalisa pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di JII tahun 2015-2020.
4. Mengalisa pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di JII tahun 2015-2020.
5. Mengalisa pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di JII tahun 2015-2020.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

   Sebagai referensi dalam mengambil keputusan bagi manajemen perusahaan agar lebih teliti dan lebih bijak dalam mengambil keputusan terutama dalam bidang perpajakan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah daftar bacaan serta menambah wawasan pembaca mengenai fakor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak *(tax avoidance).*

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini ditulis dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang didalamnya terdapat *agency theory*, profitabilitas, ukuran perusahaan, *corporate governance*, *tax avoidance*, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang dipakai, didalamnya berisi mengenai jenis dan sumber data, populasi dan sampel yang digunakan, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan cara mengukurnya serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai jumlah sampel yang digunakan, hasil pengolahan data yang didalamnya terdiri dari uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda serta pembahasan terhadap hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis data yang telah diuji, keterbatasan dalam penelitian, saran yang ditunjukkan untuk penelitian selanjutnya, serta implikasi dari penelitian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Teori ini timbul karena terdapat kontrak antara *principals* dengan *agent*. *principals* (pemegang saham) yaitu pihak yang menyampaikan perintah kepada pihak lain yaitu *agent* (manajemen) untuk menjalankan semua aktivitas *principals* berupa pengambilan keputusan.[12]

Hubungan agensi akan terjadi apabila pihak yang berkepentingan merekrut pihak lain guna menjalankan tugas. Tugas yang dimaksud yaitu *agent* diberikan wewenang untuk membuat kebijakan.[13] Menurut Suharto (2015), pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajer untuk membuat keputusan, dengan begitu akan timbul gesekan kepentingan yang kemudian dikenal dengan teori keagenan *(agency theory)*.[14]

Maksud di balik teori agensi yaitu untuk memperluas kapasitas individu baik *principals* maupun *agent* dalam pengambilan langkah kedepannya setelah dilakukan penilaian terhadap lingkungan sekitar. Alasan lain dari teori ini yaitu untuk menilai akibat dari pengambilan keputusan yang telah diambil oleh *principals* dan *agent*, apakah sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditentukan atau tidak.[15]

Menurut Jensen dan Meckling akan timbul dua masalah pada teori keagenan yaitu:[16]

a. Moral hazard, merupakan masalah yang akan muncul ketika *agent* menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.
b. *Adverse selection*, merupakan permasalah yang akan timbul dimana *agent* mengambil keputusan secara tiba-tiba dan *principals* tidak mengetahui alasan kenapa *agent* mengambil keputusan tersebut.

---

[12] Eka Murni Lusiana Wati and Susi Astuti, 'Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2.4 (2020), 641–54 (p. 642)

[13] Moses Dicky Saputra; Nur Fadjrih Asyik, p. 4.

[14] Sri Mulyani; Anita Wijayanti; Endang Masitoh, 'PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3.1 (2018), 322–40 (p. 324).

[15] Wati and Astuti, p. 642.

[16] Indah Rahmadini and Nita Erika Ariani, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4.1 (2019), 131 (p. 133)

Agency theory berfungsi untuk mengkaji dan menemukan jalan keluar atas dua macam persoalan yang muncul dalam hubungan antara *principals* dan *agent*, sebagai berikut:[17]

a. *Agency theory* merupakan masalah yang disebabkan karena berbedanya misi antara pemegang saham dengan para dewan direksi.
b. *Risk sharing problem* merupakan masalah yang disebabkan dari adanya perbedaan sikap antara pemilik dan direksi terhadap suatu risiko. Namun, pada hakikatnya teori mengenai masalah keagenan mengungkapkan cara untuk mendamaikan konflik kepentingan antar berbagai pihak dalam satu perusahaan. Perlu adanya prinsip-prinsip dasar mengenai pengelolaan perusahaan, hal ini bertujuan untuk menghindari konflik serta kerugian yang akan ditimbulkan dari adanya konflik.

Implikasi dari teori agensi dalam penelitian ini yaitu menjelaskan pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan *corporate governance* yang diproksi dengan variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dan memiliki aset yang besar cenderung melakukan penghindaran pajak, sebab *agent* berusaha mengelola beban pajak yang dibayarkan dengan tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak, sedangkan semakin besar ukuran perusahaan, maka sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin besar pula. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk mengoptimalkan kinerjanya, yaitu dengan cara memperkecil beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

Sementara itu, perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen, komite audit dan sebagian saham yang dimiliki oleh institusional lebih mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, dewan komisaris independen dan kepemilikan saham oleh institusional bertugas mengawasi setiap tindakan manajemen dalam mengambil keputusan, sedangkan tugas dari komite audit yaitu membantu dewan komisaris independen memantau kegiatan perusahaan serta bertanggung jawab pada penyajian laporan keuangan.

2.1.2 Profitabilitas

Profit atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah keuntungan, sedangkan dalam bahasa Arab, keuntungan disebut dengan *al-ribh* yang diartikan sebagai pertambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan. Adapun istilah lain mengenai keuntungan yaitu *al-nama',*

[17] Muhammad Thamrin; Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep Good Corporate Governanace Dalam Industri Manufaktur Di Indonesia* (Bogor: IPB Press Printing, 2019), p. 44.

al-ghallah, *al-faidah*. Di dalam *Almu'jam al Iqtisad al-Islami* disebutkan bahwa keuntungan merupakan tambahan penghasilan dalam perdagangan.[18] Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keuntungan atau profit terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 16

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٦

"Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

Kemudian dipertegas dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi

> *"Seorang mukmin ini bagaikan seorang pedagang, dia tidak akan menerima laba sebelum mendapatkan modal pokoknya. Dan demikian juga, seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum menerima amalan-amalam wajibnya."*

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah memberi perumpaman seorang mukmin sebagai seorang pedagang. Seorang pedagang tidak akan mendapatkan keuntungan apabila ia belum mendapatkan modal awalnya, begitu juga seorang mukmin tidak akan mendapatkan pahala terhadap amalan sunnahnya apabila amalan wajibnya belum disempurnakan.[19] Berdasarkan hadits diatas dapat diketahui bahwa laba merupakan bagian berlebih dari modal pokok. Pengertian ini sesuai dengan laba dalam bahasa arab ataupun hadits yaitu berupa pertambahan (kelebihan) dari modal pokok[20]

Laba atau keuntungan perusahaan diukur menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menganalisis kapabilitas serta menilai efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan aset dan modal yang dimilikinya.[21] Rasio profitabilitas juga sering digunakan oleh manajemen operasi atau investor dalam pengambilan keputusan. Laba bagi investor dijadikan sebagai tolak ukur perubahan nilai saham perusahaan. Sedangkan laba bagi pihak pemberi utang, dijadikan

[18] Nuri Nisak Tamama, 'Hermeneutika Laba Dalam Perspektif Islam' (Universitas Wiraraja, 2019), p. 10.

[19] Tamama, p. 11.

[20] husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), p. 147.

[21] Mita Kurnia Rizki, Ratno Agriyanto, and Dessy Noor Farida, 'The Effect of Sustainability Report and Profitability on Company Value: Evidence from Indonesian Sharia Shares', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), 117 (p. 121).

sebagai tolak ukur dari arus kas operasional yang akan digunakan untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman.[22]

Menurut Anderson dan Reeb (2003) menyebutkan perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi merupakan perusahaan yang memiliki sedikit kerugian fiskal serta memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang cukup tinggi.[23] Menurut Hanafi dan Halim (2012) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan baik dari hasil penjualan, aktiva yang dimiliki, serta modal saham tertentu.[24]

Dalam mengukur profitabilitas terdapat beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu:[25]

a) *Profit Margin Ratio,* yaitu rasio yang berfungsi untuk mengukur kapabilitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan bersih dengan mengukur tingkat penjualannya. Dalam hal ini, semakin tinggi nilai profit margin maka perusahaan dapat dikatakan efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya. *Profit margin ratio* dibedakan menjadi tiga yaitu:
    - *Net Profit Margin* (NPM), rasio ini mencerminkan bagian personalia, produksi, keuangan dan pemasaran yang ada dalam suatu perusahaan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan penjualan.
    - *Operating Profit Margin* (OPM), rasio ini mencerminkan bagian produksi, personalia, dan pemasaran yang dapat diketahui dengan cara membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan.
    - *Gross Profit Margin* (GPM), rasio ini mencerminkan bagian produksi. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi laba kotor dengan penjualan.
b) *Return On Asset*, rasio ini berfungsi guna menilai kapabilitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan melihat total keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kinerja manajemen apakah mengelola semua aset perusahaan secara efektif serta efisien. Rasio ini dapat dinilai dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

[22] Moses Dicky Saputra; Nur Fadjrih Asyik, p. 4.

[23] Ni Luh P.P Dewi and Naniek Noviari, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21.1 (2017), 830–59 (pp. 837–38).

[24] Surya Sanjaya; Muhammad Fajri Rizky, 'Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan', *KITABAH*, 2.2 (2018), 277–93 (p. 285).

[25] I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, 2nd edn (Jakarta: Erlangga, 2015), pp. 25–26.

c) *Return On Equity* merupakan rasio yang berfungsi untuk menilai kapabilitas perusahaan ketika memperoleh laba bersih dengan memperhatikan modal saham yang dimiliki oleh perusahaan. Pemegang saham mampu menggunakan rasio ini untuk dapat melihat efektifitas serta efisiensi modal saham perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Rasio ini diukur dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan modal saham yang dimiliki oleh perusahaan.

d) *Basic Earning Power*, rasio ini menggambarkan efektifitas serta efisiensi manajemen dalam mengelola semua investasi yang dimiliki perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi pendapatan sebelum pajak dan bunga dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio ROA sebagai pengukuran variabel profitabilitas suatu perusahaan. Alasan peneliti menggunakan ROA karena rasio ini berfungsi untuk mengukur kapabilitas perusahaan secara keseluruhan dalam memperoleh laba dengan menggunakan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan baik itu modal sendiri maupun modal yang diperoleh dari pinjaman.[26] Rasio *Return On Asset* (ROA) ini juga dapat mengukur kapabilitas perusahaan dalam memperoleh laba di masa lalu yang kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Tingginya nilai ROA disebabkan karena tingginya laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai ROA tinggi dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut baik dalam mengelola aktivanya.[27]

Investor juga dapat menggunakan rasio ROA guna mengukur kinerja manajemen. Para investor sering menggunakan rasio ROA untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, yang kemudian akan mempengaruhi sikap investor untuk menjual atau membeli saham perusahaan tersebut.[28]

ROA yang mempunyai nilai positif menunjukkan bahwa jumlah aset yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dapat menghasilkan keuntungan, ROA biasanya dijelaskan dalam persentase, semakin tinggi nilai ROA maka kinerja perusahaan tersebut semakin baik. Begitupun sebaliknya, ROA yang mempunyai nilai negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif atau perusahaan sedang mengalami kerugian. Sehingga dalam hal ini berarti, modal yang telah diinvestasikan pada aktiva belum dapat

[26] Yaumil Chairunnisa, 'Penngaruh Profitabilitas Dan Financial Leverage Terhadap Praktik Perataan Laba (Income Smoothing)' (Universitas Pasundan, 2019), p. 28.

[27] Rinaldi and Charoline Cheisviyanny, 'Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013)', in *Junral Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SENMA)*, 2015, VIII, 472–83 (p. 474)

[28] Chairunnisa, p. 28.

menghasilkan laba.[29] Rata-rata industri yang digunakan untuk menghitung ROA sebesar 9%. Hal ini berarti, apabila ROA suatu perusahaan diatas rata-rata industri, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki tingkat pengembalian yang rendah terhadap aset yang dimilikinya, begitupun sebaliknya apabila nilai ROA suatu perusahaan diatas rata-rata industri, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat pengembalian yang tinggi terhadap aset yang dimilikinya.[30]

2.1.3 Ukuran Perusahaan

Menurut (Cahyono, et al, 2016) ukuran perusahaan adalah indikator yang berfungsi untuk mengelompokkan suatu perusahaan berdasarkan beberapa kategori seperti perusahaan kecil *(small firm)*, perusahaan sedang *(medium firm)*, dan perusahaan besar *(large firm).*[31] Menurut Maria dan Kurniasih (2013) ukuran perusahaan yaitu pengelompokkan sebuah perusahaan berdasarkan total aktiva yang dimiliki.[32] Menurut Riyanto (2008) ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva.[33]

Pengukuran perusahaan ini dapat dilakukan dengan beragam cara seperti melihat total aktiva perusahaan, *market value* saham perusahaan, rata-rata penjualan serta jumlah penjualan perusahaan.[34] Penggunaan total aktiva sebagai pengukuran dalam penelitian ini karena total aktiva dapat menggambarkan perusahaan dalam kondisi yang stabil serta lebih mampu dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.[35]

Ukuran perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional, dikategorikan menjadi tiga, antara lain:[36]

---

[29] Ulfa Jasmine, 'Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak', *JOMFekon*, 4.1 (2017), 1786–1800 (p. 1788).

[30] Hamidah, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019), p. 57.

[31] Eneksi Dyah Puspita Sari and Shandy Marsono, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018', *Journal of Accounting and Financial*, 5.1 (2020), 45–52 (p. 47).

[32] Eneksi Dyah Puspita Sari and Shandy Marsono, p. 47.

[33] Ngadiman and Christiany Puspitasari, 'Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012', *Jurnal Akuntansi*, 18.3 (2014), 408–21 (p. 413)

[34] Eneksi Dyah Puspita Sari and Shandy Marsono, p. 47.

[35] Vivi Oktavia; Ulfi Jefri; Jaka Wijaya Kusuma, 'Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (PAda Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2018)', *Jurnal Revenue*, 01.02 (2020), 143–51 (p. 146).

[36] Sulistiono, 'Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2006-2008' (Universitas Negeri Semarang, 2010), pp. 37–38.

1. Perusahaan Kecil *(Small Firm)*

   Perusahaan dikatakan kecil ketika, perusahaan mempunyai kekayaan atau aset di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-. Dalam hal ini tidak mencakup gedung yang digunakan untuk kegiatan usaha, atau mempunyai laba tahunan diatas Rp 300.000.000,- sampai dengan Rp 2.500.000.000,-.

2. Perusahaan Menengah *(Medium Firm)*

   Perusahaan dikatakan sedang ketika, perusahaan mempunyai aset di atas Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000.000,-. Dalam hal ini tidak mencakup gedung yang digunakan untuk kegiatan usaha, atau mempunyai laba tahunan diatas Rp 2.500.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000.000,-.

3. Perusahaan Besar *(Large Firm)*

   Perusahaan dikatakan besar, ketika perusahaan mempunyai kekayaan atau aset di atas Rp 10.000.000.000,-. Dalam hal ini tidak mencakup gedung yang digunakan untuk kegiatan usaha serta mempunyai laba tahunan diatas Rp 50.000.000.000,-.

2.1.4 *Corporate Governance*

Corporate governance yaitu sebuah peraturan yang di dalamnya mengatur tentang hak serta kewajiban antara investor, pengurus, pihak yang memberikan kredit, pemerintah, tenaga kerja dan *stakeholder* yang berhubungan dengan pengendalian perusahaan.[37] Menurut Lukviarman (2006) *Corporate Governance* merupakan tata cara untuk melaksanakan sesuatu kegiatan dengan benar *(doing the right things right).* Dari pendapat di atas dapat di tarik kesimpulan bawah penerapan *corporate governance* yaitu menjalankan sesuatu dengan cara yang benar, sehingga tidak merugikan pihak manapun.[38] Menurut Wardani (2006) *corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menunjukkan hubungan antar partisipan perusahaan serta menentukan arah serta kinerja perusahaan.[39]

Manfaat dan tujuan dari diterapkannya *good corporate governance* menurut Sutojo dan Aldridge (2005), yaitu:[40]

1. Melindungi hak serta kepentingan para investor dan para anggota non-pemegang saham yang berkaitan.

[37] Moses Dicky Saputra; Nur Fadjrih Asyik, p. 4.

[38] Syeldila Sandy and Niki Lukviarman, 'Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur', *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19.2 (2015), 85–98 (p. 86)

[39] Muhammad Thamrin; Bahtiar Maddatuang, p. 58.

[40] Muhammad Thamrin; Bahtiar Maddatuang, p. 66.

2. Meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja dewan pengurus serta manajemen perusahaan.
3. Meminimalisir dari adanya biaya agensi, *agency cost* merupakan biaya yang wajib ditanggung oleh pemegang saham sebagai dampak dari adanya pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
4. Meningkatkan kualitas hubungan antara *board of manajer* dengan manajemen senior perusahaan.
5. Meningkatkan nilai saham perusahaan yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
6. Menumbuhkan kepercayaan investor dalam melakukan investasi perusahaan.

Prinsip *Corporate Governance* menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 terdiri dari lima prinsip yaitu:[41]

1. Transparansi *(transparency)*, diartikan sebagai pengambilan keputusan secara terbuka dalam menyampaikan informasi yang bersifat material serta relevan tentang perusahaan;
2. Akuntabilitas *(accountability)*, yaitu adanya pembagian serta pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dengan demikian pengelolaan suatu perusahaan mampu berjalan dengan baik;
3. Pertanggungjawaban *(responsibility)*, merupakan suatu bentuk ketaatan dalam mengelola perusahaan terhadap peraturan perundang-udangan serta berpedoman pada standar perusahaan yang sehat;
4. Kemandirian *(independency)*, merupakan suatu kondisi dimana perusahaan melaksanakan semua kegiatannya secara profesional, tidak adanya *conflict of interest* serta tidak adanya pengaruh dari pihak manapun serta berpedoman pada tata kelola perusahaan yang sehat;
5. Kewajaran *(fairness)*, merupakan tidak ada perbedaan dalam malaksanakan hak-hak pemangku kepentingan *(stakeholder)* yang ditimbulkan dari adanya kontrak serta telah diatur di dalam peraturan perundang-udangan.

Adapun prinsip *good corporate governance* dalam Islam sama seperti prinsip *good corporate governance* yang dirumuskan oleh OECD dan KNKG yang terdiri dari lima prinsip yaitu:[42]

[41] Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN*, *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementrian BUMN* (Indonesia, 2011), p. 4.

1. Transparansi

Keterbukaan atau transparansi menjadi prinsip penting dalam melaksanakan *corporate governance* dalam Islam. Keterbukaan serta keakuratan dalam menyampaikan informasi disuatu perusahaan akan menciptakan keadilan serta kejujuran semua pihak. Hal ini dapat dicapai dengan cara perusahaan dapat menjalankan etika bisnis yang Islami serta didukung dengan sistem akuntansi yang baik, terutama dalam pengungkapan laporan keuangan yang wajar serta transparan atas semua kegiatan bisnis perusahaan. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan hendaknya harus dicatat hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan.[43]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. "

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pandangan Islam, tidak hanya sebatas pada melaporkan laporan keuangan secara jujur dan wajar, namun juga mengedepankan esensi hidup manusia yang merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai pemilik seluruh alam, sehingga direktur perusahaan, manajemen serta auditor seharusnya menunjukkan sifat profesionalnya dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan *stakeholder* dan Allah SWT.[44] Hal ini terdapat pada Al-Qur;an Surat Al-An'am ayat 165 yang menjelaskan mengenai manusia yang ditunjuk sebagai 'khalifah' dan penerapan konsep pertanggungjawaban yang ditekankan oleh Allah melalui istilah 'hisab' atau perhitungan/pengadilan *(accountability)* di hari pembalasan.

[42] Muhammad Shidqon Prabowo, 'Good Corporate Governance (GCG) Dalam Prespektif Islam', *Qistie*, 11.2 (2018), 257–70 (pp. 266–68) <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i2.2592>.

[43] Nalim Nalim, 'GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 12.1 (2009), 1–14 (p. 12).

[44] Nalim, p. 11.

Adapun hisab dalam artian umum berkaitan dengan kewajiban seseorang kepada Allah disegala hal yang berkaitan dengan semua usaha manusia.[45]

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰۤىِٕفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ ۗ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۚ ١٦٥

"Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

3. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban perusahaan harus disampaikan secara jujur dan wajar atas kondisi keuangan suatu perusahaan, sehingga pemegang saham dan *stakeholder* dapat mengambil keputusan yang tepat. Pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya memakmurkan manajemen dan pemegang saham, namun juga memakmurkan karyawan yang merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan, hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29, ayat ini mengatur tentang bagaimana perusahaan memperlakukan manusia (karyawannya).[46]

.. وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

"Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

4. Independensi

Independensi yang dimaksud yaitu adanya sikap istiqomah, yaitu berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko. Hal ini sesuai dengan surat Fussilat ayat 30 yang menjelaskan tentang Allah meneguhkan jiwa yang istiqomah dalam beramal saleh, kemudian malaikat datang membawa kabar gembira ketika mereka

[45] Rahmah Yulisa; Noven Suprayogi Kalbarini, 'Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)', *JESTTT*, 1.7 (2014), 506–17 (p. 507).

[46] Dessy Noor Farida and Naili Saadah, 'Etika Pertanggungjawaban Lingkungan Dalam Bingkai Al-Qur'an', 7.2 (2019), 343–66 (p. 355).

dibangkitkan dari kubur. Orang yang istiqamah tidak merasa khawatir dengan urusan akhirat dan tidak merasa sedih dengan urusan dunia yang telah lalu.

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰۤىِٕكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ٣٠

"Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian tetap (dalam pendiriannya), akan turun malaikat-malaikat kepada mereka (seraya berkata), "Janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu."

5. Keadilan

Ketika melakukan pembukuan pada laporan keuangan hendaknya dilakukan dengan jujur, akurat serta adil, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 47 yang menjelaskan tentang semua amalan yang dilakukan manusia selama hidup di dunia akan di timbang ketika hari kiamat, walaupun amalan yang dikerjakan seberat biji sawi maka amalan tersebut akan mendapat balasannya.

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔاۗ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَاۗ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ٤٧

"Kami akan meletakkan timbangan (amal) yang tepat pada hari Kiamat, sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun (amal itu) hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya. Cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan."

Oleh karena itu penerapan *corporate governance* dalam Islam, perusahaan harus menerapkan sifat jujur dan adil terhadap semua pihak, hal ini dilakukan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik modal, melainkan pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam dengan dasar keyakinan kepada Allah.

Kepemilikan Institusional

Pada perusahaan *go public*, struktur kepemilikan saham digolongkan menjadi tiga yaitu kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham perorangan serta kepemilikan saham manajerial. Kepemilikan institusional menurut Pohan (2009) yaitu besarnya persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi serta kepemilikan *blockholder* (investor yang memiliki saham lebih dari 5%), dalam hal ini kepemilikan manajerial tidak termasuk di dalamnya.[47] Kepemilikan saham oleh institusi akan meningkatkan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja manajemen. Sebab, kepemilikan saham baik oleh pihak institusi atau *blockholder* mewakili salah satu bentuk wewenang yang berfungsi untuk menentang atau mendukung eksistensi manajemen. Semakin tinggi saham yang dimiliki oleh institusi di suatu perusahaan, mengakibatkan tingginya pengawasan yang dilakukan oleh investor institusi terhadap manajer perusahaan. Investor institusi bertugas mengawasi kegiatan manajemen agar tetap sejalan dengan kepentingan pemegang saham, dengan begitu *agency cost* dapat ditekan.[48]

Kelebihan dari adanya kepemilikan saham oleh institusional menurut Sartika (2012) dan Permanasari (2010), yaitu:[49]

1. Memiliki kopetensi dalam menganalisis suatu informasi sehingga informasi yang disajikan dapat diuji keandalannya;
2. Adanya dorongan yang kuat dalam melaksanakan pengawasan yang lebih ketat terhadap semua kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional ini dihitung dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi dengan jumlah keseluruhan saham yang beredar. Maksud dari investor institusi disini yaitu perusahaan lain yang menaruh modal atau mempunyai saham pada perusahaan tertentu.[50] Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam mengurangi konflik keagenan antara manajer perusahaan dengan investor. Adanya investor yang berasal dari institusi dianggap mampu mengawasi kegiatan serta pengambilan keputusan manajer perusahaan secara efektif.[51]

Semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh institusional maka semakin besar pula dukungan serta motivasi dari pihak institusi untuk mengontrol manajemen dalam

[47] Siti Nur Faizah and Vidya Vitta Adhivinna, 'Pengaruh Return on Assets, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Akuntansi*, 5.2 (2017), 136–45 (p. 138)

[48] Muhammad Thamrin; Bahtiar Maddatuang, p. 73.

[49] Komang Subagiastra, I Putu Edy Arizona, and I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, 'PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, (2017), 167–93 (pp. 173–74)

[50] Sandy and Lukviarman, p. 87.

[51] Masitoh, p. 325.

mengoptimalkan nilai perusahaan, hal ini mengakibatkan kinerja perusahaan meningkat. Apabila tingkat kepemilikan manajerial tinggi, hal ini akan berdampak buruk pada perusahaan, sebab manajer mempunyai posisi yang cukup berpengaruh dalam melakukan *control* terhadap suatu perusahaan, dengan begitu akan mengakibatkan investor kesulitan dalam mengendalikan tindakan manajer perusahaan.[52]

Proporsi Komisaris Independen

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Komisaris merupakan salah satu instrumen yang ada di perusahaan yang bertugas mengawasi dan menasehati direksi baik secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran dasar. Komisaris independen yaitu individu yang tidak memiliki hubungan dengan pihak manapun baik itu dengan pemegang saham pengendali, direksi ataupun komisaris. Komisaris independen tidak diperbolehkan menduduki posisi direktur di suatu perusahaan, hal ini berdasarkan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan BAPEPAM No.IX.1.5 tahun 2004 serta peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor IA tahun 2004 menerangkan bahwa dewan komisaris independen minimal 30% dari total keseluruhan dewan komisaris yang ada di sebuah perusahaan. Jika di dalam suatu perusahaan terdapat 2 anggota dewan komisaris, maka satu diantarnya wajib menjadi dewan komisaris independen.[53]

Disamping itu dewan komisaris independen harus mempunyai pemahaman mengenai undang-undang serta peraturan mengenai pasar modal dan juga diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh pemegang saham non-pengendali.[54] Komisaris Independen harus mempunyai pengalaman yang bermanfaat serta mampu bersikap objektif dan mempunyai resiko yang kecil terhadap *conflict of interest*.[55]

Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi oleh dewan komisaris Independen berdasarkan Peraturan OJK No 33/POJK 04/2014 Pasal 21 ayat 2, yaitu:[56]

1. Dewan komisaris independen merupakan seseorang yang tidak memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam membuat perencanaan, memimpin, serta mengawasi

[52] HUMAIRAH MUFIDAH, 'Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2017)' (Universitas Trisakti, 2019), p. 18.

[53] Kusuma, p. 146.

[54] Sandy and Lukviarman, p. 87.

[55] Ahmad Reza Dwi Purmana and Zulaikha, 'Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak', *Diponegoro Journal of Accounting*, 4.4 (2015), 1–11 (p. 3)

[56] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK. 04/2014*, *Ojk.Go.Id*, 2014, pp. 1–21 (pp. 12–13).

aktivitas perusahaan publik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir selama periode tertentu, kecuali diadakan penunjukkan ulang sebagai Komisaris Independen Perusahaan Publik pada periode selanjutnya;

2. Tidak memiliki saham pada Perusahaan Publik, baik itu saham langsung ataupun tidak langsung;
3. Dewan komisaris independen tidak diperbolehkan memiliki afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan Publik tersebut; serta
4. Dewan komisaris independen dilarang mempunyai hubungan bisnis baik langsung ataupun tidak langsung yang berhubungan dengan aktivitas usaha suatu Perusahaan Publik tersebut.

Perusahaan yang mempunyai dewan komisaris independen berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh OJK, memiliki tingkat pengawasan yang semakin baik. Oleh sebab itu, dewan komisaris ataupun dewan direksi akan berupaya meningkatkan kinerjanya semaksimal mungkin dalam mengontrol segala kegiatan manajemen agar sejalan dengan peraturan yang berlaku.[57]

Komite Audit

Menurut Daniri (2006), pada tahun 2000 *good corporate governance* (GCG) menjadi rekomendasi di BEI, komite audit telah menjadi elemen dalam strukutur *corporate governance* di perusahaan publik. Biasanya komite audit disuatu perusahaan mempunyai peran mengawasi manajemen dalam menyusun laporan keuangan serta memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan internal perusahaan. BEI mewajibkan semua perusahaan yang menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia untuk membentuk serta mempunyai komite audit yang dikepalai oleh komisaris independen.

Tujuan dari dibentuknya komite audit ini yaitu:

1. Untuk menetapkan bahwa laporan keuangan dapat diandalkan serta sejalan dengan praktik akuntansi yang berterima umum;
2. Menentukan bahwa *internal control* dalam suatu perusahaan telah memadai;
3. *Follow up* dari adanya kejadian yang menyimpang dan bersifat material dibidang keuangan dan berdampak pada hukumannya;

[57] Welly Florentia Indriawati, 'Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating' (Universitas Negeri Semarang, 2017), p. 32.

4. Memberi saran untuk seleksi auditor eksternal.

Pohan (2008) menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit yang mempunyai anggota minimal 3 orang. Dewan komisaris mempunyai wewenang untuk mengangkat dan merberhentikan komite audit, serta komite audit berhak untuk bertanggung jawab kepada dewan komisaris.[58] Berdasarkan surat keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep-643/BL/2012, persyaratan yang harus dipenuhi ketika menjadi komite audit yaitu:[59]

1. Memiliki kredibilitas, keahlian, pengetahuan, serta pengalaman yang berkaitan dengan profesinya, dan dapat berkomunikasi dengan baik;
2. Harus memiliki pemahaman terkait laporan keuangan, bisnis perusahaan, manajemen risiko, proses audit, serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas Perusahaan Publik;
3. Menaati aturan atau kode etik terkait komite audit yang telah ditentukan oleh Perusahaan Publik;
4. Memperluas kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan;
5. Dalam komite audit minimal terdapat satu orang yang wajib mempunyai riwayat pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi keuangan;
6. Anggota komite audit tidak diperbolehkan bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Akuntan Publik, atau pihak lain yang memberikan pelayanan jasa dibidang keuangan pada perusahaan publik selama kurun waktu 6 bulan terakhir.

Komite audit harus mempunyai kemampuan yang memadai serta mampu mengawasi aktivitas perusahaan serta dapat meminimalisir dari konflik keagenan yang ditimbulkan akibat dari adanya rencana pihak manajemen untuk melakukan kecurangan.[60]

2.1.5 *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan usaha penghindaran pajak yang dilaksanakan secara legal serta aman yang dilakukan oleh wajib pajak hal tersebut dikarenakan tidak berlawanan dengan peraturan perpajakan, adapun cara yang dilakukan yaitu dengan menggunakan kekurangan yang termuat dalam undang-undang serta aturan perpajakan yang berlaku,

[58] Sandy and Lukviarman, p. 87.

[59] Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*, 2012, pp. 1–5 (p. 2).

[60] Indriawati, p. 35.

dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayarkan.[61] Kegiatan perencanaan pajak dikatakan baik apabila dapat menghindari kelebihan penggunaan sumber daya terkait perencanaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.[62]

Tax avoidance (Penghindaran Pajak) dianggap menjadi sebuah permasalahan yang rumit, sebab disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun disisi lain penghindaran pajak ini tidak diperbolehkan. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penghindaran pajak secara tiba-tiba, melainkan perusahaan telah mengatur dan merencanakan kegiatan tersebut.[63] Upaya untuk menjadikan beban pajak yang terutang dapat dilakukan dengan beragam usaha mulai dari lingkup peraturan perpajakan sampai dengan terjadinya pelanggaran peraturan perpajakan. Pada umumnya perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang masih harus dibayarkan, dengan merekayasa transaksi tanpa melanggar peraturan perpajakan.[64]

Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kegiatan penghindaran pajak dengan cara ilegal, yaitu[65]

1. Besar pajak yang harus dibayar

   Dalam pembayaran pajak, apabila semakin tinggi pajak yang terutang, maka semakin tinggi keinginan wajib pajak dalam melakukan pelanggaran.

2. Biaya guna menyogok pemungut pajak

   Apabila biaya yang dikeluarkan dalam melakukan penyogokan terhadap pemungut pajak kecil, maka wajib pajak cenderung melanggar peraturan.

3. Kemungkinan untuk ketahuan

   Apabila peluang terdeteksinya suatu pelanggaran kecil, maka kecenderungan wajib pajak dalam melakukan pelanggaran akan semakin besar.

4. Besarnya sanksi atau hukuman

   Apabila sanksi atau hukuman yang diberikan untuk para pelanggar ringan, maka keinginan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran semakin besar.

---

[61] Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

[62] Suandy, p. 2.

[63] Ahmad Reza Dwi Purmana and Zulaikha, p. 2.

[64] Sri Mulyani; Anita Wijayanti; Endang Masitoh, 'PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3.1 (2018), 322–340 (p. 326).

[65] Suandy, p. 2.

Menurut Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* mengatakan bahwa terdapat tiga karakteristik pelaku penghindaran pajak diantaranya:[66]

1. Mengandung unsur buatan (artifisial) yang mana di dalamnya seakan-akan terdapat peraturan, namun pada kenyataannya tidak ada;
2. Rencana seperti ini biasanya menggunakan *loopholes* dari undang-undang untuk meminimalkan beban pajak, namun pada kenyataannya bukan itu yang direncanakan oleh pembuat kebijakan;
3. Rahasia merupakan salah satu karakteristik dari rencana ini, biasanya para konsultan memberitahu tata cara untuk melaksanakan kegiatan penghindaran pajak dengan ketentuan wajib pajak tidak membocorkan informasi penting.

Kegiatan *tax avoidance* merupakan kegiatan pengurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang wajib dibayar kepada negara, dengan adanya kegiatan ini tentunya terdapat pihak yang merasa dirugikan. Di dalam Islam kegiatan ini dilarang, Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Pada kalimat "janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)" mengandung arti bahwa adanya larangan untuk menggunakan harta perusahaan dengan jalan yang batil atau yang tidak dibenarkan oleh Islam.[67] Kegiatan *tax avoidance* termasuk perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Sebab, *tax avoidance* ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja oleh manajemen perusahaan untuk

[66] Suandy, p. 8.

[67] Ulul Fahmi, 'Pengaruh Tax Avoidance Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Index LQ45 Periode 2016-2018' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), p. 28.

memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan, atau membayar pajak tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

kegiatan *tax avoidance* diproksi dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR merupakan penerapan tarif pajak yang efektif berdasarkan jumlah uang yang dikeluarkan, dengan cara membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak. Alasan penulis menggunakan *Cash* ETR dalam mengukur kegiatan penghindaran pajak disebabkan karena CETR lebih mencerminkan besarnya tarif pajak yang sesungguhnya. Semakin tinggi nilai CETR yang dihasilkan atau mendekati tarif pajak penghasilan badan yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu 25%, hal ini menandakan bahwa kegiatan penghindaran pajak yang dilaksanakan perusahaan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, apabila nilai CETR semakin rendah, maka kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin tinggi.[68]

[68] Jeri Chomarus Ritonga, 'Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2017', 2019, pp. 1–22 (pp. 4–5)

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis dalam penulisan skripsi ini yang diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020)	Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018	1. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance.* 2. *Leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance.* 3. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhada*p Tax Avoidance.*
2.	Eka Murni Lusiana Wati dan Susi Astuti (2020)	Pengaruh Profitabilitas, *Good Corporate Governance* dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018	1. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.* 2. Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.* 3. Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance.* 4. Intensitas Modal tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance.*
3.	Moses Dicky Refa Saputra	Pengaruh Profitabilitas,	1. Profitabilitas (ROA) tidak memiliki pengaruh yang

	dan Nur Fadjrih Asyik (2017)	*Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*	signifikan terhadap *Tax Avoidance.* 2. *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance.* 3. *Corporate Governance* memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.*
4.	Siti Nur Faizah dan Vidya Vitta Adhivinna (2017)	Pengaruh *Return On Asset, Leverage,* Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*	1. *Return On Asset (ROA)* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance.* 2. Leverage tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance.* 3. Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance.* 4. Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance.*
5.	Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah (2017)	Kualitas Audit, *Corporate Social Responsibility*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*	1. Kualitas Audit memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. 2. *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Aavoidance*. 3. Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance.*
6.	Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, dan Endang	Pengaruh *Size, Age, Profitability, Leverage* dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*	1. *Size* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* 2. *Age* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* 3. *Profitability* tidak memiliki

	Masitoh W (2018)		pengaruh terhadap *Tax Avoidance* 4. *Leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* 5. *Sales Growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance.*
7.	Deanna Puspita dan Meiriska Febrianti (2017)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia	1. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance.* 2. *Return On Asset* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance.* 3. *Sales Growth* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance.* 4. *Leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance.* 5. Intensitas Modal tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance.* 6. Komposisi Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance.*
8.	Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverag*e, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak	1. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.* 2. *Leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.* 3. *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negatif

		(Tax Avoidance)	terhadap *Tax Avoidance.* 4. Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidnace*.
9.	Ulfa Jasmine (2017)	Pengaruh *Leverage*, kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak	1. *Leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. 4. Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
10.	Farid Addy Sumantri, Rr Dian Anggraeni, Agus Kusnawan (2018)	*Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	1. Proporsi Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* 2. Komite Audit memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* 3. Kepemilikan Manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*
11.	Ahmad Waluya Jati, Ihyaul Ulum dan Cahyo Utomo (2019)	*Tax Avoidance, Corporate Governance,* dan Kinerja Keuangan Perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index	1. *Corporate Governance* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance.* 2. Kinerja Keuangan Perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance.*
12.	Vivi Oktavia, Ulfi Jefri dan Jaka Wijaya Kusuma (2020)	Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax*	1. Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* 2. Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*

		Avoidance	3. Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*
13.	Sri Mulyani, Anita Wijayanti, Endang Masitoh (2018)	Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI)	1. Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance.* 2. Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance.* 3. Komite Audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance.* 4. Kualitas Audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance.*
14.	Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka (2018)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*	1. Kepemilikan Instusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance.* 2. Kepemilikan Manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance.* 3. Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance.*

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas yaitu salah satu komponen penting dalam menghitung pajak penghasilan suatu perusahaan, sebab profitabilitas merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan perusahaan dibidang keuangan. Performa keuangan suatu perusahaan ini dapat dihitung dengan cara melihat nilai *Return On Asset* (ROA) yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai ROA, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan baik dalam mengelola aktivanya. Lestari dan Sugiharto (2007) menyatakan bahwa, ROA merupakan indikator untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan berdasarkan pendayagunaan aset yang terdapat di dalam perusahaan. Semakin besar nilai *Return On Assets* (ROA), maka keuntungan bersih yang dihasilkan oleh perusahaan akan semakin besar pula.

Teori agensi menjelaskan bahwa *agent* akan terpacu untuk mengoptimalkan profit perusahaan. Apabila profit perusahaan tinggi, maka besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan ikut meningkat, hal ini memungkinkan perusahaan melakukan kegiatan *tax avoidance* untuk menekan beban pajak yang ikut mengalami peningkatan. Dalam teori agensi, *Agent* berupaya untuk mengatur beban pajak yang dibayarkan dengan tidak menurunkan kompensasi kinerja *agent* sebagai dampak dari berkurangnya keuntungan perusahaan atas beban pajak.[69] Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi, mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan *tax planning* yaitu berupa pengurangan beban pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan terhadap pemerintah.[70]

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Jasmine (2017) mengungkapkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kegiatan penghindaran pajak *(tax avoidance).* Begitupula hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance)* perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis pertama yang akan diuji pada penelitian ini yaitu:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance)*

[69] Ida Rosa Dewinta and Putu Ery Setiawan, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14.3 (2016), 1584–1615 (p. 1595).

[70] Jasmine, p. 1791.

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil. Perusahaan besar biasanya mempunyai aktiva yang besar dan dianggap mampu dalam memperoleh keuntungan, apabila dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aktiva lebih sedikit atau dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil.

Menurut Siegfied (1972) dalam Ricahrdson dan Lanis (2007) mengungkapkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka nilai CETR yang dihasilkan akan semakin rendah, hal ini disebabkan karena sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan besar dianggap dapat menjalankan perencanaan pajak dengan baik *(polotocal power theory).* Tetapi, perusahaan kurang maksimal dalam memanfaatkan kapasitasnya guna melancarkan *tax planning*, dikhawatirkan perusahaan menjadi target dari regulator.[71]

Menurut teori agensi, *agent* dapat menggunakan sumber daya yang terdapat pada perusahaan untuk mengoptimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara memperkecil beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.[72]

Siti Nur Faizah & Vidya Vitta Adhivinna (2017) dan Amanda Dhinari Pertamata, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh W (2018) meneliti apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance)*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance)*. Hal ini tidak sama dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Ulfa Jasmine (2017), Deanna Puspita & Meiriska Febrianti (2017), dan Eneksi Syah Puspita Sari & Shandy Marsono (2020) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance)* yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance)*

[71] Jasmine, p. 1791.
[72] Rosa Dewinta and Ery Setiawan, p. 1593.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Definisi kepemilikan institusional Menurut Pohan (2009) yaitu besarnya persentase saham suatu institusi serta kepemilikan *blockholder* (investor yang memiliki saham di atas 5%) tetapi kepemilikan manajerial tidak termasuk di dalamnya.[73] Investor institusi akan mengoptimalkan pengendalian atas kinerja manajemen perusahaan.[74]

Teori agensi menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara manajemen dengan pemilik saham, semakin tinggi persentase saham institusi mengakibatkan pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak institusional semakin tinggi. Shafer dan Simmons (2006) mengatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam mendisiplinkan, mengawasi, serta mempengaruhi manajer dalam melakukan manajemen pajak.[75]

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhil Ismi dan Linda (2016) serta Ni Putu Ayu Indira Yuni dan Putu Ery Setiawan (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak *(Tax Avoidance)*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar saham institusi, maka kegiatan penghindaran pajak di dalam perusahaan akan semakin rendah.

Berdasarkan penjelasan di atas, diduga kepemilikan institusional mempunyai hubungan negatif dengan *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance)*

2.3.4 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Dewan komisaris independen di dalam perusahaan berfungsi untuk mengawasi kegiatan manajemen serta menyeimbangkan keputusan yang diambil oleh manajemen serta tidak bertentangan dengan kepentingan pemegang saham minoritas serta pihak yang mempunyai kepentingan. Dewan komisaris independen tidak semata-mata bertugas memantau manajemen dalam mengambil keputusan, namun juga bertugas untuk memantau manajemen dalam pemilihan standar akuntansi yang digunakan, kemudian akan mempengaruhi laba yang dihasilkan.[76] Dalam suatu perusahaan, apabila dewan komisaris independen semakin

[73] Adhivinna, p. 138.
[74] Muhammad Thamrin; Bahtiar Maddatuang, p. 73.
[75] Sandy and Lukviarman, p. 89.
[76] Moses Dicky Saputra; Nur Fadjrih Asyik, p. 6.

banyak maka pengawasan serta pengendalian terhadap direksi dan manajer dalam mengelola perusahaan akan semakin efektif.[77]

Manajemen sering kali mementingkan kepentingannya sendiri, dimana manajemen mempunyai alasan guna memaksimalkan keuntungan bersih agar bonus yang didapatkan semakin banyak. Pernyataan ini sesuai dengan teori agensi, yang mana pihak manajemen berperan sebagai *agent* yang mempunyai informasi terkait kemampuan perusahaan secara keseluruhan, sedangkan pemegang saham bertindak sebagai *principals* yang mempunyai informasi sangat terbatas, oleh sebab itu dewan komisaris yang menjadi perwakilan dari *principals* memiliki tugas mengawasi kinerja *agent* atau manajemen perusahaan. Strategi yang dilakukan oleh *principals* berupa pengawasan kepada *agent* dengan tujuan untuk mempengaruhi serta mengawasi manajemen perusahaan *(agent),* sehingga *agent* bekerja untuk kepentingan serta memberikan keuntungan bagi *principals*.[78] Dengan demikian semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan maka kegiatan penghindaran pajak *(tax avoidance)* dalam suatu perusahaan dapat ditekan.

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Mulyani, Anita Wijayanti, dan Endang Masitoh (2018) dan Ahmad Waluya Jati, Ihyaul Ulum, dan Cahyo Utomo (2019) yang mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farid Addy Sumantri, Rr. Dian Anggraeni, dan Agus Kusnawan (2018) yang mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance).*

Hasil uraian diatas mengenai pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

H4: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance)*

2.3.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Ikatan Komite Audit (IKA) pengertian Komite Audit yaitu suatu komite yang bekerja dengan profesional serta independen yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan. Dalam hal ini, komite audit bertugas membantu serta menguatkan peran dari

[77] Farid Addy Sumantri; Rr Dian Anggraeni; Agus Kusnawan, 'Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *ECo-Buss*, 1.2 (2018), 124–39 (p. 128).

[78] Yunita Valentina Kusufiyah and Dina Anggraini, 'Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan Dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak', *E-Jurnal Akuntansi*, 26 (2019), 1601 (p. 1609)

dewan komisaris atau dewan pengawas dalam melakukan tugasnya berupa *controling* atau pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan audit, manajemen risiko, serta penerapan dari *corporate governance* di perusahaan.[79]

Teori agensi menyebutkan bahwa, perusahaan yang mempunyai komite audit lebih banyak akan menimbulkan pengawasan yang lebih tinggi, serta dengan adanya komite audit maka konflik keagenan yang disebabkan oleh pihak manajemen dalam melaksanakan kegiatan penghindaran pajak *(tax avoidance)* dapat diminimalisir. Hal ini berarti, perusahaan yang mempunyai komite audit, lebih transparan serta bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan keuangan, sebab komite audit senantiasa mengawasi kegiatan perusahaan.[80] Anggota komite audit harus mempunyai pemahaman di bidang akuntansi keuangan dan juga lebih mengetahui peluang suatu aturan perpajakan untuk menghindari resiko deteksi, sehingga mampu menghasilkan saran yang berguna bagi manajer perusahaan.[81]

Vivi Oktavia, Ulfi Jefri, Jaka Wijaya Kusuma (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak *(tax avoidance).* Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Farid Addy Sumantri, Rr. Dian Anggraeni, Agus Kusnawan (2018) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak *(tax avoidance).*

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis kelima yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

H5: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance)*

[79] Kusuma, p. 146.
[80] Indriawati, p. 50.
[81] Masitoh, p. 328.

2.4 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, penulis menggunakan lima variabel independen yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance)*, yang terdiri dari profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA), ukuran perusahaan yang diukur dengan *SIZE*, dan *corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan komite audit. Informasi dari variabel-variabel tersebut peneliti dapatkan dari laporan tahunan perusahaan yang menerbitkan saham di Jakarta Islamic Index tahun 2015-2020. Sehingga kerangka pemikiran yang terbentuk dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

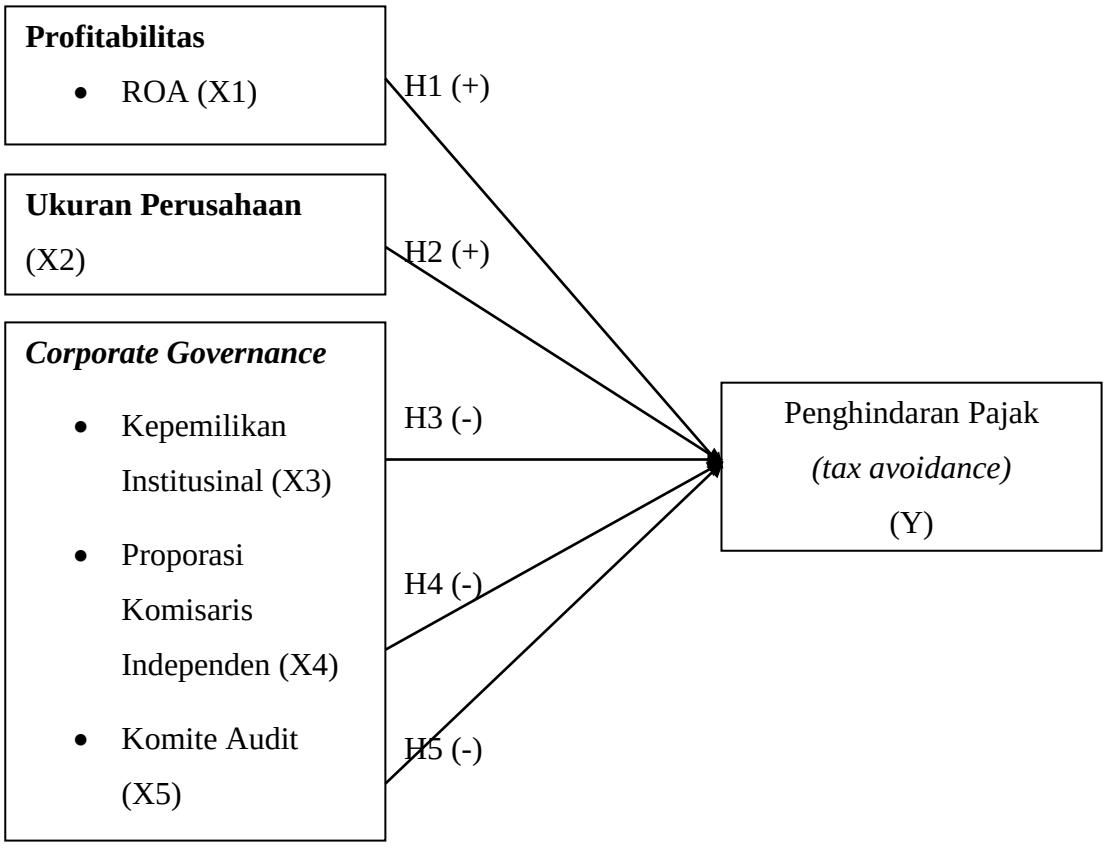

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan teknik analisis data berupa analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini menggunakan data sekender berupa laporan tahunan perusahaan yang menerbitkan sahamnya di JII serta konsisten menerbitkan saham disana selama enam tahun berturut-turut.

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui website BEI yaitu www.idx.co.id atau website setiap perusahaan, data yang digunakan yaitu berupa *annual report* yang telah dilakukan proses audit oleh auditor independen.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang sesuai dengan kategori saham syariah di JII. Pemilihan Jakarta Islamic Index sebagai objek penelitian karena seperti diketahui JII menerbitkan saham perusahaan yang termasuk dalam kriteria saham syariah dan peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan yang menerbitkan saham di JII terindikasi melakukan kegiatan penghindaran pajak.

Rentang waktu penelitan yang digunakan yaitu selama enam tahun dari tahun 2015-2020. Jumlah perusahaan yang masuk ke dalam kategori saham syariah pada tahun 2015-2020 sebanyak 55 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria (pertimbangan) tertentu dari anggota populasi.[82] Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perusahaan yang secara konsisten *listing* di Jakarta Islami Index berturut-turut selama 6 tahun yaitu tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.
2. Perusahaan yang menerbitkan *annual report* tahun 2015-2020
3. Perusahaan yang memakai satuan rupiah dalam laporan keuangannya *(annual report).*
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun 2015-2020.

[82] Agung Widhi Kurniawan and Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), p. 69.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yang dilakukan berupa pengumpulan data dari *annual report* perusahaan yang *listing* di Jakarta Islamic Index pada tahun 2015-2020 melalui website www.idx.co.id atau website setiap perusahaan. Pada penelitian ini juga menggunakan studi pustaka berupa literatur, seperti buku, jurnal penelitian, dan skripsi penelitian terdahulu yang berguna untuk memperoleh teori yang relevan.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.[83] Peneliti ini menggunakan penghindaran pajak *(tax avoidance)* sebagai variabel dependen.

3.4.1.1 Penghindaran Pajak (Y)

Upaya kegiatan penghindaran pajak yang dilaksanakan secara legal oleh wajib pajak sebab tidak berlawanan dengan aturan perpajakan atau disebut dengan *tax avoidance*. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu guna memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pengukuran penghindaran pajak *(tax avoidance)* dalam penelitian ini menggunakan CETR *(cash effective tax rate)*.

CETR merupakan sejumlah uang yang digunakan oleh perusahaan guna membayar biaya pajak dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Apabila nilai CETR yang dihasilkan tinggi, maka kegiatan penghindaran pajak yang dijalankan oleh perusahaan semakin rendah, dengan begitu perusahaan tidak terindikasi melaksanakan kegiatan penghindaran pajak. Adapaun rumus untuk menghitung CETR *(cash effective tax rate)* adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

[83] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, CV, 2013), p. 39.

timbulnya variabel dependen (terikat).[84] Variabel independen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, serta komite audit

3.4.2.1 Profitabilitas (X1)

Rasio yang digunakan untuk menilai variabel profitabilitas dalam penelitian ini yaitu *Return On Asset* yang merupakan rasio profitabilitas yang digunakan sebagai pembanding antara pendapatan bersih dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode. ROA digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan.[85] Semakin tinggi nilai ROA maka performa perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan cara memanfaatkan aset yang dimiliki semakin baik. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung ROA adalah

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba (Rugi) Bersih setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \text{x } 100\%$$

3.4.2.2 Ukuran Perusahaan (X3)

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya total aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan diklasifikasikan menjadi 3 yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan Logaritma natural total aset. Adapun rumus untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu

SIZE = Ln (Total Aktiva)

3.4.2.3 *Corporate Governance*

Corporate Governance menurut Nasution dan Setiawan (2007) yaitu konsep yang diajukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan serta pemantauan kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan berdasarkan aturan yang berlaku.[86]

Terdapat 5 (lima) proksi yang digunakan untuk mengukur *corporate governance* seperti proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas

[84] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, p. 39.
[85] Wati and Astuti, p. 643.
[86] Masitoh, p. 325.

audit, komite audit dan kepemilikan institusional.[87] Pengukuran *corporate governance* dalam penelitian ini terdiri dari 3 proksi yaitu kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan komite audit.

3.4.2.3.1 Kepemilikan Instituional (X3)

Variabel kepemilikan institusional dapat dinilai dengan membagi total saham yang dimiliki oleh investor institusi dengan jumlah saham yang beredar. Maksud dari investor institusi yaitu perusahaan lain yang mempunyai saham pada perusahaan tertentu.[88] Adapun rumus untuk menghitung kepemilikan institusional adalah

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang diterbitkan}}$$

3.4.2.3.2 Proporsi Komisaris Independen (X4)

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris Perusahaan}} \text{x100\%Car}$$

a untuk menilai variabel proporsi komisaris independen dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris secara keseluruhan dalam perusahaan.[89] Adapun rumus untuk menghitung proporsi komisaris independen sebagai berikut:

3.4.2.3.3 Komite Audit (X4)

Variabel komite audit dinilai dengan cara menjumlahkan seluruh komite audit yang ada di perusahaan. Berdasarkan peraturan BI No. 8/14/PBI/2006 mengenai pelaksanaan *good corporate governance*, komite audit di suatu perusahaan sedikitnya berjumlah 3 orang. Adapun rumus untuk mengukur komite audit sebagai berikut:

Komite Audit = Σ Jumlah Komite Audit

[87] Kartika Setiyani, 'PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE , PROFITABILITAS , UKURAN PERUSAHAAN , DAN LEVERAGE TERHADAP (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017) SKRIPSI Oleh : Nama : Kartika Setiyani FAKULTAS EKONOMI UNIVERSI' (Universitas Islam Indonesia, 2019), p. 42.

[88] Setiyani, p. 43.

[89] PUSPITA and FEBRIANTI, p. 43.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Fungsi dari Statistik deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan obyek yang sedang diuji berdasarkan data berupa sampel atau populasi sebagaimana mestinya, dengan tidak menganalisis serta membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Adapun data yang disajikan berupa tabel biasa maupun tabel distribusi frekuensi, garis, diagram, grafik, batang, diagram pictogram, lingkaran penjelasan kelompok melalui mean, median, modus, dan variasi kelompok melalui rentang serta simpangan baku.[90]

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal, grafik data yang terdistribusi normal akan membentuk lonceng *(bell shaped).*[91] Uji normalitas dapat diketahui melalui penyebaran titik pada grafik normal *probability plot*. Apabila titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan tidak menjauhi garis diagonal maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.

Selain itu, uji *kolmogorov-smirnov* digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak, dengan tingkat kepercayaan atau signifikansi yang digunakan pada Uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah 5%.[92]

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi ataupun sempurna antar variabel independen.[93] Apabila variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal* (nilai korelasi tidak sama dengan nol).

Nilai multikolinieritas di dalam suatu model regresi dapat diketahui dengan cara melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* digunakan khusus untuk mengukur variabel bebas yang telah dipilih. Pada dasarnya nilai *cut off* yang digunakan adalah nilai *tolerance* lebih besar atau sama dengan 0,10 atau nilai VIF

[90] Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: ALFABETA, CV, 2017), p. 29.

[91] Singgih Santoso, *Statistik Multivariat Dengan SPSS* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), p. 42.

[92] Kusnawan, p. 131.

[93] Dyah Nirmala Arum Janie, *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS* (Semarang: Semarang University Press, 2012), p. 19.

lebih kecil atau sama dengan 10. Jadi multikolinieritas dapat terjadi apabila nilai *tolerance* ≤ 0,10 atau nilai VIF ≥ 10.[94]

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah pada model regresi linier terdapat korelasi antara residual periode saat ini dengan residual periode sebelumnya. Model regresi dikatakan baik apabila model tersebut terbebas dari autokorelasi, terdapat beberapa cara untuk menguji autokorelasi, salah satunya yaitu dengan menggunakan Uji Durbin-Watson atau DW Test. Adapun cara pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian menggunakan Uji Durbin-Watson (DW Test) sebagai berikut:[95]

Tabel 3. 1

Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesis nol	**Keputusan**	**Jika**
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	0 < d < dlL
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	dL ≤ d ≤ dL
Tidak ada korelasi negatif	Ditolak	4-dL < d < 4
Tidak ada korelasi negatif	No decision	4-dU ≤ d ≤ 4-dL
Tidak ada autokorelasi, positif ataupun negatif	Tidak ditolak atau diterima	dU < d < 4-dU

Sumber: Ghazali 2011

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah didalam model regresi yang digunakan dalam suatu penelitian terdapat perbedaan varian dan residual antara pengamatan satu dengan pengamatan lainnya. Apabila varian dan residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya tetap maka disebut dengan homoskedastisitas. Namun, jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Adapun cara yang digunakan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik *scatterplots*, atau

[94] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19*, 5th edn (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), pp. 105–6.

[95] Ghozali, pp. 110–11.

melakukan uji *park*, uji *glesjer*, dan uji *white* dengan tingkat probabilitas signifikansi yang diperoleh harus diatas 5%.[96]

3.5.3 Pengujian Hipotesis

3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda untuk menganalisis dari adanya pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan komite audit terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) pada perusahaan yang *listing* di Jakarta Islamic Index tahun 2015-2020 dengan $\alpha = 5\%$. Adapun model persamaan regresi linier berganda yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
α	= Nilai Y, apabila $X_1 = X_2 = 0$
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien regresi linier berganda
X1	= Profitabilitas
X2	= Ukuran Perusahaan
X3	= Kepemilikan Institusional
X4	= Proporsi Komisaris Independen
X5	= Komite Audit
ε	= Kesalahan Pengganggu *(disturbance terma)*

3.5.3.2 Uji Koefisisen Determinasi (R^2)

Uji koefisien Determinasi ini digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen di dalam penelitian dapat menjelaskan variabel-variabel dependen. Adapun nilai koefisien determinasi berkisar antara 0-1. Semakin kecil nilai R^2, maka kemampuan variabel independen dalam mendeskripsikan variabel dependen sangat terbatas, begitupun sebaliknya jika nilai R^2 yang mendekati 1, hal ini berarti bahwa

[96] Ghozali, pp. 139–43.

variabel independen dapat menjelaskan seluruh informasi yang diperlukan untuk dapat menjelaskan variabel dependen.[97]

3.5.3.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Adapun tingkat signifikansi yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu 0,05 (5%). Hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel ANOVA dalam kolom sig. Namun, apabila nilai signifikansi yang dihasilkan kurang dari 0,05, hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.[98]

3.5.3.4 Uji Hipotesis (Uji T)

Uji T berguna untuk mengetahui berapa besar pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini diasumsikan variabel lain memiliki nilai yang konstan atau tetap. Uji T dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dan nilai T pada output hasil regresi menggunakan bantuan SPSS. Nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 (α = 5%). Adapun pengambilan keputusan pada uji T yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis di tolak yang berarti terdapat perbedaan signifikansi antara model regresi dengan nilai observasi, sehingga model penelitian tersebut diketahui belum tepat. Apabila nilai signifikansi $\leq$ 0,05, maka hipotesis diterima hal ini berarti model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian sudah tepat.[99]

[97] Ghozali, p. 97.
[98] Ghozali, p. 98.
[99] Moses Dicky Saputra; Nur Fadjrih Asyik, p. 10.

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari pembahasan ini untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan *corporate governanace* terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada perusahaan yang *listing* di Jakarta Islamic Index tahun 2015-2020. Pengujian ini dilakukan dengan menguji variabel independen yang terdiri dari profitabilitas yang diproksi dengan ROA, ukuran perusahaan yang diproksi dengan *size*, dan *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan komite audit terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang diproksi menggunakan CETR.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan yang *listing* di Jakarta Islamic Index tahun 2015-2020. Data penelitian diperoleh melalui website BEI di www.idx.co.id atau website setiap perusahaan. Populasi perusahaan yang menerbitkan saham di JII selama enam tahun sebanyak 55 perusahaan. Metode yang digunakan untuk memperoleh objek penelitian ini yaitu metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti, sehingga diperoleh sampel sebanyak 8 perusahaan. Proses pengambilan sampel pada penelitian ini dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1

Pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan yang konsisten *listing* di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2015-2020	10
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan *annual report* tahun 2015-2020	0
3.	Perusahaan yang tidak menggunakan satuan rupiah dalam laporan keuangannya *(annual report)*	(2)
4.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2015-2020	0
5.	Tahun Pengamatan	6 Tahun
	Jumlah Sampel	**48**

Sumber: data sekunder yang sudah diolah 2021

Dari kriteria yang telah di tentukan, didapatkan 8 perusahaan yang sesuai dengan kriteria, yaitu:

Tabel 4. 2

Daftar Perusahaan yang Memenuhi Kriteria

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk
2.	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
3.	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
4.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
5.	TLKM	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
6.	UNTR	PT United Tractors Tbk
7.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk
8.	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Sumber: Data diolah

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data dengan cara melihat nilai minimum, maksimum, rata-rata *(mean)* dan deviasi standar *(standar deviasi)*. Nilai maksimum digunakan untuk melihat nilai maksimum dari sampel dan nilai minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dari sebuah sampel. Rata-rata *(mean)* dipakai untuk memprediksi nilai rata-rata populasi dari sampel. Sedangkan standar deviasi dipakai untuk menilai disperse rata-rata dari suatu sampel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sampel secara keseluruhan yang telah sesuai dengan kriteria untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

Tabel 4. 3

Tabel Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	48	.005	.447	.12538	.106037
Ukuran Perusahaan	48	30.248	33.140	31.44096	.907056
Kepemilikan Institusional	48	50.070	85.000	64.22125	11.558906
Proporsi Komisaris Independen	48	.250	.833	.44998	.157061
Komite Audit	48	3.000	7.000	3.54167	1.051004
Tax Avoidance	48	.000	.349	.22996	.082752
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Output olahan IBM SPSS Statistic 21 (2021)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, jumlah objek (N) yang diteliti pada tahun 2015-2020 sebanyak 48 data observasi yang berasal dari enam tahun pengamatan (2015-2020) dengan sampel yang digunakan sebanyak 8 perusahaan yang menerbitkan saham di Jakarta Islamic Index.

Tabel 4.3 memperlihatkan hasil uji statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Adapun hasil analisis dari variabel profitabilitas memperlihatkan bahwa nilai minimum yang dihasilkan sebesar 0,005 atau 0,5% milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 0,447 atau 44,7% milik PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2018, dengan nilai rata-rata sebesar 0,12538 atau 12,54%. Standar deviasi dari varibael profitabilitas sebesar 0,106037 atau 10,6%. Hal ini berarti nilai rata-rata profitabilitas perusahaan yang terdaftar di JII sebesar 12,54% atau diatas rata-rata industri sebesar 9%, hal ini berarti tingkat pengembalian perusahaan terhadap aktiva yang dimiliki tinggi.

Ukuran Perusahaan dapat diketahui dengan melihat banyak atau sedikitnya total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai minimum sebesar 30,248 milik PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2015 serta nilai maksimum sebesar 33,140 milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada tahun 2020, dengan nilai rata-rata sebesar 31,44096. Standar deviasi dari variabel ukuran perusahaan sebesar 0,907056. Ukuran perusahaan mempunyai nilai rata-rata sebesar 31,44096 atau setara dengan mempunyai aset diatas Rp 10.000.000.000, dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang menerbitkan sahamnya di JII pada tahun 2015-2020 dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar, sebab memiliki aset diatas Rp 10.000.000.000, hal ini juga berarti semakin besar nilai SIZE yang dihasilkan oleh perusahaan, maka perusahaan memiliki peluang untuk melancarkan kegiatan penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional yaitu banyaknya saham yang dimiliki oleh suatu institusi. Banyak atau sedikitnya saham yang dimiliki oleh institusional akan mempengaruhi kebijakan perpajakan suatu perusahaan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap variabel kepemilikan institusional diperoleh nilai minimum sebesar 50,07% milik PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2015-2020 dan nilai maksimum sebesar 85% milik PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2015-2020, dengan nilai rata-rata sebesar 64,22%. Standar deviasi dari varibel kepemilikan institusional sebesar 11,56%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada perusahaan yang *listing* di JII dalam penelitian ini sebanyak 64,22% sahamnya dimiliki oleh institusional dan sisanya sebesar 35,88% dimiliki oleh publik.

Agar terwujudnya *good corporate governance* dalam suatu perusahaan diperlukan keberadaan komisaris independen yang bertugas membantu dewan komisaris. Hasil analisis deskriptif

terhadap variabel proporsi komisaris independen diperoleh nilai minimum sebesar 0,250 atau 25% milik PT AKR Corporindo Tbk pada tahun 2015-2016 dan nilai maksimum sebesar 0,833 atau 83,3% milik PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2020 dengan nilai rata-rata sebesar 0,44998 atau 44,9%. Standar deviasi dari varibel proporsi komisaris independen sebesar 0,157061 atau 15,7%. Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh dari analisis deskriptif sebesar 0,44998 atau 44,9%, hal ini berarti proporsi komisaris independen perusahaan yang *listing* di JII telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh OJK, yaitu jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan minimal 30% dari seluruh dewan komisaris perusahaan.

Berdarkan hasil analisis deskriptif terhadap variabel komite audit diperoleh nilai minimum sebesar 3 yang dimiliki oleh 6 perusahaan yang menerbitkan saham di JII dan nilai maksimum sebesar 7 dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada tahun 2020 dengan nilai rata-rata sebesar 3,54167. Standar deviasi dari variabel komite audit sebesar 1,051004. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang *listing* di JII telah sesuai dengan surat edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No SE 008/BEJ/12-2001 menyebutkan bahwa anggota komite audit dalam perusahaan paling sedikit berjumlah 3 orang.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap variabel *tax avoidance* diperoleh nilai minimum sebesar 0 atau 0% milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 0,349 atau 34,9% milik PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2015 dengan nilai rata-rata sebesar 0,22996 atau 22,9%. Standar deviasi dari variabel *tax avoidance* sebesar 0,082752 atau 8,2%. Nilai rata-rata yang dihasilkan terhadap variabel *tax avoidance* perusahaan yang *listing* di JII sebesar 22,9% atau mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%, hal ini diasumsikan bahwa perusahaan yang mempunyai nilai CETR tinggi maka kemungkinan perusahaan dalam melaksanakan penghidaran pajak rendah, begitupun sebaliknya.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk melihat serta mengukur kelayakan dari model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Adapun variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan komite audit. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak). Berikut merupakan uji asumsi klasik yang dilaksanakan dalam penelitian ini.

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Terdapat dua metode guna mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak antara lain dengan menggunakan analisis grafik serta uji statistik. Pada penelitian ini hasil analisis grafik dapat dilihat pada grafik histogram dan grafik normal P-Plot, sedangkan hasil

uji statistik dapat dilihat pada tabel *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Adapun ketentuan dalam uji *Kolmogorov Smirnov* (K-S) yaitu, jika nilai probablitas signifikansi > 0,05 data dapat dikatakan terdistribusi dengan normal, namun jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka dikatakan data tidak terdistribusi dengan normal.[100]

Gambar 4. 1

Uji Normalitas: Grafik Histogram

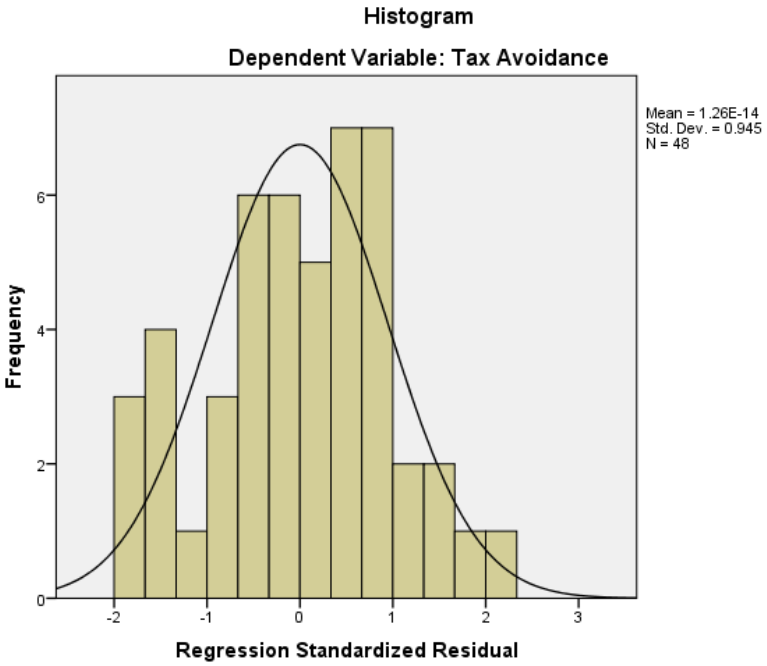

Sumber: Output olahan IBM SPSS Statistic 21 (2021)

[100] Ghozali, pp. 160–65.

Gambar 4. 2

Uji Normalitas: Grafik Normal P-Plot

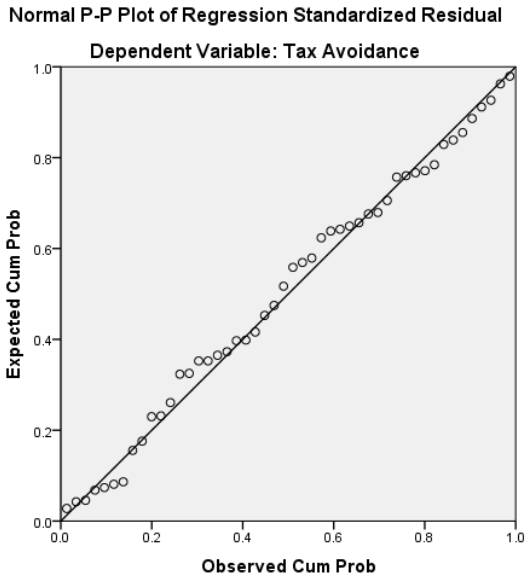

Sumber: Output olahan IBM SPSS Statistic 21 (2021)

Berdasarkah hasil olahan uji normalitas dengan menggunakan SPSS berupa grafik histogram yang terdapat pada gambar 4.1 dan grafik *normal P-Plot* yang terdapat pada gambar 4.2 dapat ditarik kesimpulan bahwa grafik histogram pada gambar 4.1 memberikan pola distribusi tepat di tengah-tengah atau berbentuk lonceng *(bell shaped)*. Hal tersebut dapat dikatakan data terdistribusi secara normal. Apabila melihat grafik *normal P-Plot* titik-titik menyebar disekitaran garis diagonal, namun penyebarannya mendekati garis diagonal.

Jika melihat kedua grafik diatas memperlihatkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Namun, uji normalitas yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya melihat pada grafik histogram dan grafik *normal P-Plot,* sebab kedua grafik tersebut kurang dapat dipercaya, sehingga diperlukan uji lainnya untuk memperkuat hasil olahan uji normalitas yaitu dilakukan uji *Kolmogorov-smirnov* yang bertujuan untuk memperkuat uji sebelumnya.

Tabel 4. 4

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05038899
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		.493
Asymp. Sig. (2-tailed)		.968

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output olahan IBM SPSS Statistic 21 (2021)

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-smirnov*, nilai *kolmogorov-smirnov* adalah 0,493 dengan *Asymp. Sig*. (2-tailed) sebesar 0,968. Hasil dari pengujian ini memperlihatkan bahwa nilai Asym. Sig. > 0,05 atau 5% hal ini menandakan bahwa data residual dalam regresi terdistribusi secara normal (0,968 > 0,05), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan antara varibel independen (bebas). Sebenarnya, model regresi dikatakan baik jika tidak terdapat korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk melihat apakah terjadi multikolinieritas atau tidak, dapat melihat *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance value* yang dipakai dalam penelitian ini yaitu ≥ 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) yaitu ≤ 10. Dibawah ini merupakan hasil dari uji multikolinieritas yang disajikan dalam tabel 4.5.

Tabel 4. 5

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Profitabilitas	.159	6.290
	Ukuran Perusahaan	.548	1.825
	Kepemilikan Institusional	.369	2.709
	Proporsi Komisaris Independen	.127	7.895
	Komite Audit	.704	1.420

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Output olahan IBM SPSS Statistic 21 (2021)

Berdasarkan hasil dari Uji Multikolinieritas yang terdapat pada tabel 4.5 memperlihatkan bahwa tidak ada varibel bebas dalam penelitian ini yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 atau dapat dikatakan semua nilai *tolerance* dalam penelitian ini diatas 0,10. Apabila melihat nilai VIF, maka tidak ada varibel bebas yang mempunyai nilai diatas 10 atau dapat dikatakan bahwa semua nilai VIF dalam penelitian ini kurang dari 10. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas dalam model regresi penelitian ini, sehingga data di dalam penelitian ini dapat digunakan.

4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat hubungan antara penyimpangan periode saat ini dengan penyimpangan periode sebelumya. Penelitian ini menggunakan nilai Durbin-Watson (DW test) untuk mengetahui adanya autokorelasi atau tidak, dengan menggunakan persamaan $dU < d < 4 - dU$. Apabila terdapat korelasi, maka diketahui adanya autokorelasi, sebab model regresi dikatakan baik apabila terbebas dari autokorelasi.

Tabel 4. 6

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.793[a]	.629	.585	.053304	1.857

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Output olahan IBM SPSS Statistic 21 (2021)

Berdasarkan hasil uji Autokorelasi pada tabel 4.6 dihasilkan nilai DW sebesar 1,857 dengan nilai signifikansi sebesar 5%, banyaknya sampel (n) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 48, dan jumlah varibel bebas (independen) sebanyak 5 variabel (K=5).

Berdasarkan jumlah varibel bebas yang digunakan dalam penelitian ini maka dihasilkan nilai batas bawah (dL) sebesar 1,3167 dan nilai batas atas (dU) sebesar 1,7725, nilai dL dan dU diperoleh dari tabel Durbin-Watson dengan taraf signifikansi 5%. Hasil dari 4-dU yaitu sebesar 2,2275 dan 4-dL yaitu sebesar 2,6833. Berdasarkan tabel 4.6 diatas diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,857, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil olah data tersebut sama dengan persamaan dU < DW < 4-dU yaitu 1,7725 < 1,857 < 2,2275. Hal ini berarti, tidak terjadi autokorelasi baik itu positif maupun negatif. Sehingga dapat dikatakan, di dalam penelitian ini tidak ada gelaja autokorelasi.

4.3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan *variance* dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain di dalam model regresi. Dikatakan homoskedastisitas, apabila *variance* dari residual pengamatan itu tetap. Namun, apabila berbeda maka disebut sebagai heteroskedastisitas.

Grafik *scatterplot* berguna untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas. Suatu penelitian dapat dikatakan tidak terjadi hereroskedastisitas dalam grafik *scatterplot* yaitu titik-titik tidak membentuk suatu pola tertentu serta menyebar secara acak baik di bawah angka 0 maupun diatas angka 0 pada sumbu Y.

Gambar 4. 3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

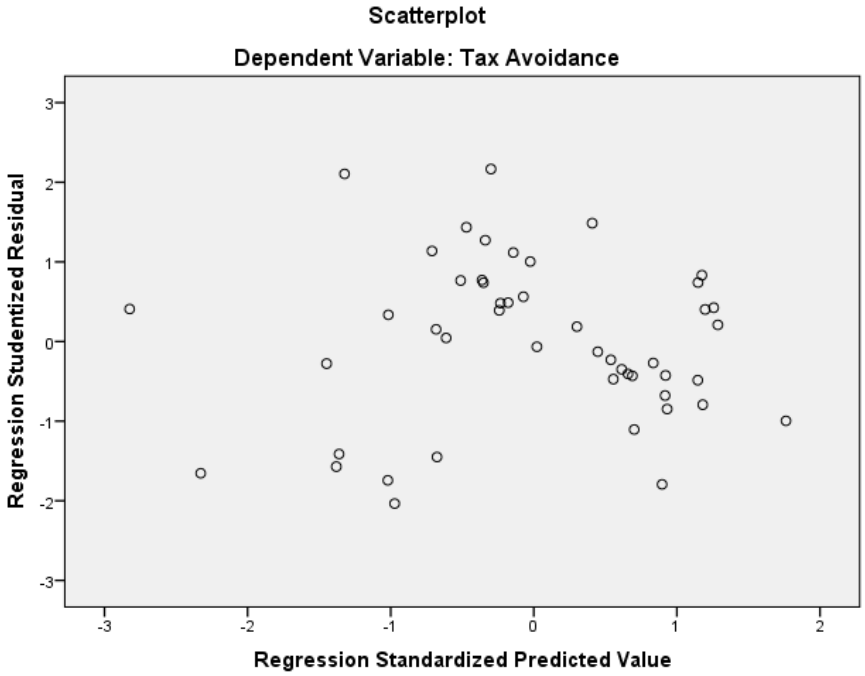

Sumber: Output olahan IBM SPSS Statistic 21 (2021)

Berdasarkan grafik *scatterplo*t pada gambar 4.3 dapat bahwa bahwa titik tidak membentuk sebuah pola tertentu serta titik menyebar secara tidak beraturan, baik itu di atas angka 0 atau di bawah angka 0 pada sumbu Y. berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu alat yang digunakan untuk menganalisis serta mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta untuk menentukan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 4. 7

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.461	.370		-3.955	.000
	Profitabilitas	.213	.184	.273	1.157	.254
	Ukuran Perusahaan	.062	.012	.678	5.345	.000
	Kepemilikan Institusional	-.002	.001	-.300	-1.942	.059
	Proporsi Komisaris Independen	.155	.139	.294	1.115	.271
	Komite Audit	-.060	.009	-.762	-6.810	.000

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Output olahan IBM SPSS Statistic 21 (2021)

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda yang dijelaskan pada tabel 4.7, berikut merupakan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini:

Y = -1,461 + 0,213 Profitabilitas + 0,062 Ukuran Perusahaan - 0,002 Kepemilikan Institusional + 0,155 Proporsi Komisaris Independen - 0,060 Komite Audit + ε

Persamaan regresi diatas merupakan penjelasan dari penelitian ini, yaitu variabel profitabilitas (X1), ukuran perusahaan (X2), dan proporsi komisaris independen (X4) berpengaruh positif (+) terhadap penghidaran pajak *(tax avoidance)*. Sedangkan variabel kepemilikan institusional (X3) dan komite audit (X5) berpengaruh negatif (-) terhadap penghidaran pajak *(tax avoidance)*. Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai Konstanta (α) sebesar -1,461, hal ini berarti bahwa apabila variabel profitabilitas (X1), ukuran perusahaan (X2), kepemilikan institusional (X3), proporsi komisaris independen (X4), dan komite audit (X5) adalah 0, maka nilai dari perngindaran pajak *(tax avoidance)* sebesar -1,461.
2. Nilai koefisien regresi Profitabilitas yang diproksi dengan *return on asset* sebesar 0,213. Dalam hal ini berarti nilai tersebut menunjukkan bahwa ketika profitabilitas perusahaan yang diproksi dengan ROA mengalami peningkatan sebesar 1%, hal ini akan diikuti dengan peningkatan usaha penghindaran pajak *(tax avoidance)* sebesar 0,213 atau sebesar 21,3%, dengan mengasumsikan variabel ukuran perusahaan,

kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan komite audit memiliki nilai nol atau konstan.

3. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,062. Dalam hal ini berarti nilai tersebut menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan variabel ukuran perusahaan sebesar 1%, hal ini akan diikuti dengan peningkatan usaha penghindaran pajak *(tax avoidance)* sebesar 0,062 atau 6,2% dengan mengasumsikan variabel profitabilitas, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan komite audit memiliki nilai nol atau konstan.
4. Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar – 0,002. Dalam hal ini berarti nilai tersebut menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan variabel kepemilikan institusional sebesar 1%, hal ini akan diikuti dengan penurunan usaha penghindaran pajak *(tax avoidance)* sebesar 0,002 atau 0,2% dengan mengasumsikan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, proporsi komisaris independen, dan komite audit memiliki nilai nol atau konstan.
5. Nilai koefisien regresi proporsi komisaris independen sebesar 0,155. Dalam hal ini berarti nilai tersebut menunjukkan bahwa, ketika terjadi peningkatan pada variabel proporsi komisaris independen sebesar 1%, hal ini akan diikuti dengan peningkatan usaha penghindaran pajak *(tax avoidance)* sebesar 0,155 atau 15,5% dengan mengasumsikan variabel bebas seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan komite audit memiliki nilai nol atau konstan.
6. Nilai koefisien regresi komite audit sebesar - 0,060. Dalam hal ini berarti nilai tersebut menunjukkan bahwa, ketika terjadi peningkatan pada variabel komite audit sebesar 1%, maka akan diikuti dengan menurunnya usaha penghindaran pajak *(tax avoidance)* sebesar 0,060 atau 6% dengan mengasumsikan semua variabel bebas seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen memiliki nilai nol atau konstan.

4.4.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien Determinasi (R^2) merupakan satu pengujian yang digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam mengartikan variabel dependen. Adapun nilai R^2 berkisar antara nol sampai satu. Apabila nilai koefisien determinasi kecil hal ini menandakan bahwa varibel independen belum bisa memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menerangkan varibel dependen atau dalam artian variabel independen memiliki kemampuan yang cukup terbatas, sedangkan apabila nilai R^2

mendekati atau sama dengan satu hal ini berarti bahwa varibel independen memberikan seluruh informasi yang diperlukan guna memproyeksikan semua variabel dependen.

Tabel 4. 8

Hasil Uji Koefisien Determinari (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.793[a]	.629	.585	.053304

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Output olahan IBM SPSS Statistic 21 (2021)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,585. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan komite audit dapat menjelaskan variabel *tax avoidance* sebesar 58,5% dan 41,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi ini seperti *leverage*, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, kualitas audit dan lain sebagainya.

4.4.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F atau disebut dengan uji signifikansi simultan merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Variabel independen dapat dikatakan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen apabila memiliki tingkat signifikansi < 0,05.

Tabel 4. 9

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.203	5	.041	14.255	.000[b]
	Residual	.119	42	.003		
	Total	.322	47			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistic 21 (2021)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas diperoleh nilai signifikansi simultan atau uji F sebesar 14,255 dengan signifikansi sebesar 0,000, dimana signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (α=5%), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel *tax avoidance*.

4.4.4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji signifikansi parameter individual atau uji T atau digunakan untuk mengetahui besar atau kecilnya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05 atau 5%.

Tabel 4. 10

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.461	.370		-3.955	.000
	Profitabilitas	.213	.184	.273	1.157	.254
	Ukuran Perusahaan	.062	.012	.678	5.345	.000
	Kepemilikan Institusional	-.002	.001	-.300	-1.942	.059
	Proporsi Komisaris Independen	.155	.139	.294	1.115	.271
	Komite Audit	-.060	.009	-.762	-6.810	.000

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Output yang diolah IBM SPSS Statistic 21 (2021)

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual atau uji T dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. **Profitabilitas Tidak Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

   Berdasarkan tabel 4.10 yang merupakan hasil dari uji T, memperlihatkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Hasil dari uji T di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05. Apabila dibandingkan dengan nilai alpha yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%, maka nilai signifikansi yang didapat dari hasil perhitungan lebih besar (0,254 > 0,05) dengan nilai t hitung sebesar 1,157. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), sehingga H1 ditolak.

2. **Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif terhadap *Tax Avoidance***

   Berdasarkan tabel 4.10 yang merupakan hasi dari uji T, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Hasil dari uji T di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0,05. Apabila dibandingkan terhadap nilai alpha yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 5%, maka nilai signifikansi yang didapat dari hasil perhitungan lebih kecil (0,000 < 0,05) dengan nilai t hitung sebesar 5,345. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak), sehingga H2 diterima.

3. **Kepemilikan Institusional Tidak Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

   Berdasarkan tabel 4.10 yang merupakan hasil dari uji T, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Hasil dari uji T di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Apabila dibandingkan dengan nilai alpha yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 5%, maka nilai signifikansi yang didapat dari hasil perhitungan lebih besar (0,059 > 0,05) dengan nilai t hitung sebesar - 1,942. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), sehingga H3 ditolak.

4. **Proposi Komisaris Independen Tidak Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan tabel 4.10 yang merupakan hasil dari uji T, memperlihatkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Hasil dari uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Apabila dibandingkan dengan nilai alpha yang dipakai dalam penelitian ini yaitu lebih besar dari 5%, maka nilai signifikansi yang didapat dari hasil perhitungan lebih besar (0,271 > 0,05) dengan nilai t hitung sebesar 1,115. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terdadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), sehingga H4 ditolak.

5. **Komite Audit Berpengaruh Negatif terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan tabel 4.10 yang merupakan hasil dari uji T, memperlihatkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Hasil dari uji T di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. Apabila dibandingkan dengan nilai alpha yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kurang dari 5%, maka nilai signifikansi yang di dapat dari hasil perhitungan lebih kecil (0,000 < 0,05) dengan nilai t hitung sebesar – 6,810. Beradasakan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), sehingga H5 diterima.

4.5 Pembahasan Hipotesis

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang *listing* di Jakarta Islamic Index pada tahun 2015-2020. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap variabel independen diperoleh hasil yang berbeda, hanya sebagian kecil variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, adapun variabel yang mempunyai dampak terhadap *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan dan komite audit, sedangkan varibel profitabilitas, kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berikut pembahasan mengenai hipotesis yang telah diuji oleh peneliti:

4.5.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji statistik yang telah dilaksanakan, variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Sehingga, hipotesis pertama ditolak yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Nuringsih (2010) mengatakan perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas cukup tinggi mengindikasikan bahwa manajemen tidak melakukan kegiatan efisiensi. Utami (2013) menyatakan dalam hal ini dimungkinkan menjadi penyebab kenapa variabel *Return On Asset* dalam penelitiannya tidak memiliki terhadap *tax avoidance*[101] adapun nilai sampel rata-rata variabel ROA dalam penelitian ini sebesar 12,54%, jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013) yang memiliki nilai rata-rata variabel ROA sebesar 10,3%.

Adapun variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* disebabkan perusahaan dianggap mampu membayar beban pajak yang dibebankan dengan memanfaatkan asetnya secara efektif dan efisien, sehingga perusahaan yang mempunyai nilai ROA tinggi memutuskan untuk membayar beban pajak dibanding harus melakukan kegiatan penghindaran pajak *(tax avoidance)*.[102] Sebab, kegiatan *tax avoidance* (penghindaran pajak) ini memiliki risiko yang besar, sehingga manajemen menghindari kegiatan ini untuk meminimalkan risiko kegiatan investasinya. Kegiatan *tax avoidance* juga dapat menimbulkan beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan seperti membayar konsultan pajak, pembayaran denda atas reputasi, serta denda yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak akibat dari kegiatan penghindaran pajak ini.[103]

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadjrih Asyik (2017) serta penelitan yang dilakukan oleh Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh Wahyuningsih (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Namun, hasil dari penelitian ini bertentangan dengan hasil Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020) serta penelitian yang

[101] Fadhil Ismi; Linda, 'PENGARUH THIN CAPITALIZATION , RETURN ON ASSET , DAN CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN JAKARTA ISLAMI INDEX (JII)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1.1 (2016), 150–65 (p. 162).

[102] Moses Dicky Saputra; Nur Fadjrih Asyik, p. 16.

[103] Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, and Endang Masitoh Wahyuningsih, 'Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19.1 (2018), 10 (p. 8)

dilakukan oleh Eka Murni Lusiana Wati dan Susi Astuti (2020) yang menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4.5.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji statistik yang telah dilakukan, variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Sehingga, hipotesis kedua diterima yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, sehingga kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin besar pula.

Perusahaan diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil. Perusahaan besar dianggap lebih mampu untuk menghasilkan pendapatan yang stabil apabila dibandingkan dengan perusahaan kecil. Berdasarkan teori agensi, *agent* dapat menggunakan sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan kinerjanya yaitu dengan cara mengurangi beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.[104] Manajer pada perusahahaan besar memiliki kecenderungan untuk melakukan pemilihan metode akuntansi yang bertujuan untuk menahan pendapatan agar tidak dilaporkan pada periode sekarang melainkan dilaporkan pada periode mendatang. Perusahaan besar juga memiliki banyak aktivitas operasi sehingga memiliki bagian yang dapat digunakan untuk praktik *tax avoidance*, sebaliknya perusahaan berukuran kecil minim akan kegiatan, sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan praktik *tax avoidance*.[105]

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) serta penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Jamine (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap kegiatan penghindaran pajak. Namun, hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah (2017) dan penelitain yang dilakukan oleh Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh W (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

[104] Rosa Dewinta and Ery Setiawan, p. 1606.
[105] Puspitasari, p. 419.

4.5.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Pada dasarnya, investor institusional mempunyai kendali yang lumayan besar dalam kegiatan operasional perusahaan, namun disisi lain semua investor berharap perusahaan memperoleh laba yang besar agar dividen yang dibagikan juga besar. Namun, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh institusional cenderung mengawasi kegiatan manajemen agar laba yang dihasilkan dan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.[106]

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, variabel kepemilikan instiusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Sehingga, hipotesis ketiga ditolak yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance)*. Hal ini menunjukkan bahwa banyak atau sedikitnya saham yang dimilki oleh institusi tidak menjamin perusahaan terhindar dari praktik penghindaran pajak. Fahdhilah (2014) menyatakan bahwa ada atau tidaknya saham yang dimiliki oleh institusional, kegiatan *tax avoidance* (penghindaran pajak) akan tetap terjadi. Biasanya pemilik saham institusional kurang memperhatikan citra perusahaan sehingga kebijakan manajemen yang berhubungan dengan kesejahteraan pemegang saham akan selalu didukung, sekalipun itu merupakan kegiatan penghindaran pajak. Seharusnya, kepemilikan institusional dapat memainkan peranannya yaitu mengawasi, mendisiplinkan serta mempengaruhi manajer untuk menghindari perilaku mementingkan dirinya sendiri, namun pada kenyataannya besar atau tidaknya kepemilikan institusional tidak dapat memberikan dampak pada kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam memenuhi kepentingannya sendiri.[107]

Hal ini juga dibuktikan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh institusional lebih dari 84% yaitu PT Unilever Indonesia Tbk, sebanyak 85% sahamnya dimiliki oleh institusional memiliki nilai CETR 25,4% pada tahun 2016. Sedangkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebanyak 50,07% sahamnya dimiliki oleh institusional memiliki nilai CETR 34,9% pada tahun 2015 atau lebih besar apabila dibandingkan dengan PT Unilever Indonesia Tbk sebanyak 85% sahamnya dimiliki oleh institusional. Hal ini berarti bahwa besar atau kecilnya saham yang dimiliki oleh institusional tidak mempengaruhi terhadap praktik penghindaran pajak *(tax avoidance)*.

---

[106] Khairul Adhi Fiandri and Dul Muid, 'PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KINERJA', 6 (2017), 1–13 (p. 9).

[107] Novita Sari, Elvira Luthan, and Nini Syafriyeni, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2018', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20.2 (2020), 376–87 (p. 384)

Hasil dari penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari, Elvira Luthan, serta Nini Syafriyeni (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahsanu ‘Amala dan Safriansyah (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Jasmine (2017) serta penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Anita Wijayanti, Endang Masitoh (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak *(tax avoidance).*

4.5.4. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Sehingga, hipotesis keempat ditolak yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance)*.

Nilai rata-rata dari dewan komisaris independen pada perusahaan yang menerbitkan saham di JII sebesar 44,99%, maka dari itu perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 tahun 2007, peraturan BAPEPAM No.IX.1.5 tahun 2004 serta peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor 1A tahun 2004 yang berisi bahwa perusahaan yang menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia minimal mempunyai 30% Dewan Komisaris Independen dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa banyak atau tidaknya jumlah komisaris independen perusahaan tidak berpengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh pihak manajemen.[108] Hal ini disebabkan karena, hanya sebagian anggota dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan mampu memperlihatkan sifat independensinya sehingga fungsi pengawasan yang menjadi tugas dari dewan komisaris independen tidak berjalan secara optimal, hal ini mengakibatkan minimnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.[109] Tidak hanya itu, penyebab lain dewan komisaris independen tidak mempuyai pengaruh pada *tax avoidance* yaitu dewan komisaris di perusahaan bertugas sebagai pemberi nasihat kepada direksi dan juga menetapkan bahwa

[108] Muhammad Ahsanu ’Amala and Safriansyah, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indoneisa’, *Spread*, 9.2 (2020), 29–39 (p. 114).

[109] Masitoh, pp. 334–35.

perusahaan telah menaati aturan yang berlaku.[110] Dewan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi secara langsung keputusan manajemen dalam pengambilan keputusan, sebab itu bukan bagian dari wewenang dewan komisaris independen.[111]

Hal ini juga dibuktikan dengan jumlah dewan komisaris independen pada suatu perusahaan tidak mempunyai dampak pada kegiatan penghindaran pajak yang dijalankan oleh perusahaan, seperti PT Unilever Indonesia Tbk yang memiliki dewan komisaris independen 80% dari banyaknya dewan komisaris yang ada, memiliki nilai CETR sebesar 25,3% pada tahun 2019. Adapun PT United Tractors Tbk yang memiliki komisaris independen 33,3% dari banyaknya dewan komisaris yang ada, memiliki nilai CETR sebesar 28,1% pada tahun 2019. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi kegiatan *tax avoidance.*

Hasil dari penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deanna Puspita dan Meiriska Febrianti (2017) serta penelitian yang dilakukkan oleh Vivi Oktavia, Ulfi Jefri fan jaka Wijaya Kusuma (2020) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Namun, hasil dari penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Farid Addy Sumantri, Rr Dian Anggraeni, Agus Kusnawan (2018) serta penelitian yang dilakukan oleh Eka Murni Lusiana Wati dan Susi Astuti (2020) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

4.5.5. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan uji statistik deskriptif sebanyak 75% data observasi memiliki komite audit sebanyak 3 orang, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 mengenai pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan, berisi tentang jumlah komite audit minimal 3 orang pada perusahaan. Selanjutnya, sebanyak 25% data observasi memiliki komite audit lebih dari 3 orang.

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Maka, hipotesis kelima diterima, yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ini

[110] Tati Yulia Okrayanti, Supri Wahyudi Utomo, and Elva Nuraina, 'Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance', *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 5.1 (2017), 804–17 (p. 812).

[111] Ni Kadek Yuliani Utari; Ni Luh Supadmi, 'Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Koneksi Politik Pada Tax Avoidance', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.3 (2017), 2202–30 (p. 2222).

menunjukkan bahwa tingkat kasus penghindaran pajak ditetapkan oleh banyak atau sedikitnya jumlah komite audit pada perusahaan, atau semakin banyak jumlah komite audit dalam suatu perusahaan maka kegiatan *tax avoidance* (penghindaran pajak) di suatu perusahaan akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit jumlah komite audit di suatu perusahaan maka kegiatan penghindaran pajak akan semakin tinggi.[112] Sebab, fungsi komite audit di suatu perusahaan yaitu sebagai pengawas dalam penyusunan laporan keuangan, dengan dilakukannya pengawasan diharapkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen terhadap laporan keuangan dapat diminimalisir.[113]

Hasil dari penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Syeldila Sandy dan Niki Lukviarman (2015) dan penelitian yang dilakukan oleh Farid Addy Sumantri, Rr Dian Anggraeni dan Agus Kusnawan (2018) yang mengungkapkan bahwa komite audit mempunyai pengaruh negatif pada praktik penghindaran pajak *(tax avoidance).* Namun, penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadjri Asyik (2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

[112] Sandy and Lukviarman, p. 96.
[113] Moses Dicky Saputra; Nur Fadjrih Asyik, p. 17.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tax avoidance yaitu suatu kegiatan penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak secara legal dengan cara memanfaatkan kekurangan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menekan beban pajak yang terutang oleh perusahaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan komite audit yang diduga memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak *(tax avoidance)* pada perusahaan yang *listing* di Jakarta Islamic Index pada tahun 2015-2020.

Berdasarkan pengujian statistik yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Profitabilitas yang diproksi dengan *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi dianggap mampu untuk membayar semua beban pajak yang dibebankan, daripada harus melakukan kegiatan penghindaran pajak *(tax avoidance)*.
2. Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, sehingga kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin besar pula, sebab semakin luas lingkup perusahaan maka semakin banyak kegiatan operasionalnya, sehingga perusahaan memiliki celah untuk dimanfaatkan sebagai praktik *tax avoidance.*
3. Variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dengan demikian besar atau kecilnya saham yang dimiliki oleh institusional tidak menjamin perusahaan dapat terhindar dari praktik penghindaran pajak *(tax avoidance).*
4. Variabel Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.* Dengan demikian banyak atau sedikitnya jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh pihak manajemen.
5. Variabel Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa naik atau turunnya kasus penghindaran pajak dipastikan oleh banyak atau sedikitnya anggota komite audit dalam perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Menurut hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitaian ini diantaranya:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada objek pengamatan, yaitu hanya meneliti perusahaan yang menerbitkan saham di JII, yang mana Jakarta Islamic Index hanya berisi 30 perusahaan saja.
2. Terdapat 2 perusahaan yang menggunakan satuan dollar sebagai mata uang dalam laporan keuangannya, sehingga peneliti tidak dapat menganalisis.
3. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,585 yang berarti variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan komite audit mempunyai pengaruh sebesar 58,5% terhadap *tax avoidance*, yang kemudian sisanya sebesar 41,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada penelitian ini.

5.3 Saran

berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, adapun saran yang dapat peneliti ajukan untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan populasi penelitian pada perusahaan yang *listing* di JII, untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat memperluas populasi penelitian dengan mengubah objek penelitian menjadi seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI atau di JII70.
2. Dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti 6 tahun pengamatan saja yaitu dari tahun 2015-2020. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas atau memperbaharui tahun pengamatan agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.
3. Pada penelitian ini, variabel profitabilitas hanya diproksi dengan satu perhitungan saja yaitu *Return On Assets* (ROA). Peneliti berikutnya, diharapkan mengganti proksi perhitungan dalam rasio profitabilitas dengan *Return On Equity* (ROE), *Profit Margin Ratio* atau *Basic Earning Power*.
4. Dalam penelitian ini hanya meneliti lima faktor yang diduga mempengaruhi kegiatan *tax avoidance* yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan komite audit. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengubah serta memperluas faktor lain seperti *leverage*, kepemilikan keluarga, *corporate social responsibility* (CSR) atau lain sebagainya.

5.4 Implikasi Penelitian

1. **Bagi perusahaan:** peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat membantu serta memperluas wawasan perusahaan mengenai kegiatan *tax avoidance*, dengan begitu manajemen perusahaan dapat merancang mekanisme perusahaan sebaik mungkin yaitu dengan tidak melakukan kegiatan penghindaran pajak *(tax avoidance)* dengan cara menekan biaya-biaya termasuk beban pajak didalamnya. Sebab, hal tersebut tidak hanya dapat merugikan Negara, namun juga dapat mencoreng nama baik perusahaan dimata publik.
2. **Bagi Investor:** sebelum memutuskan untuk berinvestasi di sutau perusahaan, alangkah baiknya melakukan analisis investasi terlebih dahulu mengenai kinerja dari perusahaan tersebut, serta melihat apakah perusahaan tersebut telah menaati peraturan perpajakan yang ditetapkan atau belum, kemudian apakah perusahaan tersebut terindikasi melakukan kegiatan penghindaran pajak atau tidak. Sebab kegiatan *tax avoidance* ini akan memberikan dampak negatif di berbagai pihak seperti investor, perusahaan, dan juga pemerintah.
3. **Bagi Pembuat Kebijakan:** hasil penelitian ini, diharapkan berguna untuk dijadikan sebagai indikator oleh pemerintah mengenai perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan *tax avoidance*, sehingga dapat membuat peraturan untuk menghambat kegiatan penghindaran pajak. Hal ini bertujuan agar memperkecil celah untuk dimanfaatkan oleh pelaku penghindaran pajak, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

’Amala, Muhammad Ahsanu, and Safriansyah, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indoneisa’, *Spread*, 9.2 (2020), 29–39

Adhivinna, Siti Nur Faizah and Vidya Vitta, ‘Pengaruh Return on Assets, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance’, *Jurnal Akuntansi*, 5.2 (2017), 136–45 <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>

Agung Widhi Kurniawan and Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016)

Ahmad Reza Dwi Purmana and Zulaikha, ‘Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak’, *Diponegoro Journal of Accounting*, 4.4 (2015), 1–11 <https://doi.org/10.1024/1016-264X/a000083>

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*, 2012, pp. 1–5

Chairunnisa, Yaumil, ‘Penngaruh Profitabilitas Dan Financial Leverage Terhadap Praktik Perataan Laba (Income Smoothing)’ (Universitas Pasundan, 2019)

Dedi, ‘Konsep Kewajiban Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam’, *Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 5.2 (2017), 205–18

Dewi, Ni Luh P.P, and Naniek Noviari, ‘Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)’, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21.1 (2017), 830–59

Eneksi Dyah Puspita Sari and Shandy Marsono, ‘Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018’, *Journal of Accounting and Financial*, 5.1 (2020), 45–52

Fahmi, Ulul, ‘Pengaruh Tax Avoidance Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Index LQ45 Periode 2016-2018’ (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)

Farida, Dessy Noor, and Naili Saadah, ‘Etika Pertanggungjawaban Lingkungan Dalam Bingkai Al-Qur’an’, 7.2 (2019), 343–66

Fiandri, Khairul Adhi, and Dul Muid, ‘PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KINERJA’, 6 (2017), 1–13

Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19*, 5th edn (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011)

Hamidah, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019)

Indriawati, Welly Florentia, 'Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating' (Universitas Negeri Semarang, 2017)

Janie, Dyah Nirmala Arum, *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS* (Semarang: Semarang University Press, 2012)

Jasmine, Ulfa, 'Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak', *JOMFekon*, 4.1 (2017), 1786–1800

Kalbarini, Rahmah Yulisa; Noven Suprayogi, 'Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)', *JESTTT*, 1.7 (2014), 506–17

Kusnawan, Farid Addy Sumantri; Rr Dian Anggraeni; Agus, 'Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *ECo-Buss*, 1.2 (2018), 124–39

Kusufiyah, Yunita Valentina, and Dina Anggraini, 'Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan Dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak', *E-Jurnal Akuntansi*, 26 (2019), 1601 <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p28>

Kusuma, Vivi Oktavia; Ulfi Jefri; Jaka Wijaya, 'Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (PAda Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2018)', *Jurnal Revenue*, 01.02 (2020), 143–51

Linda, Fadhil Ismi;, 'PENGARUH THIN CAPITALIZATION , RETURN ON ASSET , DAN CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN JAKARTA ISLAMI INDEX (JII)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1.1 (2016), 150–65

Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2018)

Masitoh, Sri Mulyani; Anita Wijayanti; Endang, 'PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3.1 (2018), 322–40

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN, Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementrian BUMN* (Indonesia, 2011)

Moses Dicky Saputra; Nur Fadjrih Asyik, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate

Governance Terhadap Tax Avoidance.', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.8 (2017), 1–19

MUFIDAH, HUMAIRAH, 'Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2017)' (Universitas Trisakti, 2019)

Muhammad Thamrin; Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep Good Corporate Governanace Dalam Industri Manufaktur Di Indonesia* (Bogor: IPB Press Printing, 2019)

Nalim, Nalim, 'GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 12.1 (2009), 1–14

Ni Kadek Yuliani Utari; Ni Luh Supadmi, 'Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Koneksi Politik Pada Tax Avoidance', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.3 (2017), 2202–30

Okrayanti, Tati Yulia, Supri Wahyudi Utomo, and Elva Nuraina, 'Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance', *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 5.1 (2017), 804–17

ortax, 'Raksasa Rokok Menghindar Pajak RI', *Ortax.Org* (Jakarta, 2019) <https://ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=16551&q=&hlm=>

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK. 04/2014*, *Ojk.Go.Id*, 2014, pp. 1–21

Permata, Amanda Dhinari, Siti Nurlaela, and Endang Masitoh Wahyuningsih, 'Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19.1 (2018), 10 <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171>

Pohan, Chairil Anwar, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013)

Prabowo, Muhammad Shidqon, 'Good Corporate Governance (GCG) Dalam Prespektif Islam', *Qistie*, 11.2 (2018), 257–70 <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i2.2592>

PUSPITA, DEANNA, and MEIRISKA FEBRIANTI, 'Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19.1 (2018), 38–46 <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>

Puspitasari, Ngadiman and Christiany, 'Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012', *Jurnal Akuntansi*, 18.3 (2014), 408–21 <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>

Rahmadini, Indah, and Nita Erika Ariani, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4.1 (2019), 131

<https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i1.10805>

Rinaldi, and Charoline Cheisviyanny, 'Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013)', *Junral Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SENMA)*, 8.2 (2015), 472–83 <http://fe.unp.ac.id/>

Ritonga, Jeri Chomarus, 'Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2017', 2019, pp. 1–22

Rizki, Mita Kurnia, Ratno Agriyanto, and Dessy Noor Farida, 'The Effect of Sustainability Report and Profitability on Company Value: Evidence from Indonesian Sharia Shares', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), 117 <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.1.3747>

Rizky, Surya Sanjaya; Muhammad Fajri, 'Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan', *KITABAH*, 2.2 (2018), 277–93

Rosa Dewinta, Ida, and Putu Ery Setiawan, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14.3 (2016), 1584–1615

Sandy, Syeldila, and Niki Lukviarman, 'Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur', *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19.2 (2015), 85–98 <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>

Santoso, Singgih, *Statistik Multivariat Dengan SPSS* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017)

Sari, Novita, Elvira Luthan, and Nini Syafriyeni, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2018', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20.2 (2020), 376–87 <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>

Setiyani, Kartika, 'PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE , PROFITABILITAS , UKURAN PERUSAHAAN , DAN LEVERAGE TERHADAP (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017) SKRIPSI Oleh : Nama : Kartika Setiyani FAKULTAS EKONOMI UNIVERSI' (Universitas Islam Indonesia, 2019)

Suandy, Erly, *Perencanan Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2017)

Subagiastra, Komang, I Putu Edy Arizona, and I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, 'PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1.2 (2017), 167–93

<https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994>

Sudana, I Made, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, 2nd edn (Jakarta: Erlangga, 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, CV, 2013)

———, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: ALFABETA, CV, 2017)

Sulistiono, 'Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2006-2008' (Universitas Negeri Semarang, 2010)

Syahatah, husein, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001)

Tamama, Nuri Nisak, 'Hermeneutika Laba Dalam Perspektif Islam' (Universitas Wiraraja, 2019)

Wati, Eka Murni Lusiana, and Susi Astuti, 'Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2.4 (2020), 641–54 <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i4.619>

Wisanggeni, Irwan; Michell Suharli, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Variabel Profitabilitas (ROA)

No	Nama Perusahaan	Tahun	Laba Setelah Pajak	Total Aset	ROA
1	AKRA	2015	Rp 1.058.741.020.000	Rp 15.203.129.563.000	0,070
2	ICBP	2015	Rp 2.923.148.000.000	Rp 26.560.624.000.000	0,110
3	INDF	2015	Rp 3.709.501.000.000	Rp 91.831.526.000.000	0,040
4	KLBF	2015	Rp 2.057.694.281.873	Rp 13.696.417.381.439	0,150
5	TLKM	2015	Rp 23.317.000.000.000	Rp 166.173.000.000.000	0,140
6	UNTR	2015	Rp 2.792.439.000.000	Rp 61.715.399.000.000	0,045
7	UNVR	2015	Rp 5.851.805.000.000	Rp 15.729.945.000.000	0,372
8	WIKA	2015	Rp 703.005.054.000	Rp 19.602.406.034.000	0,036
9	AKRA	2016	Rp 1.046.852.086.000	Rp 15.830.740.710.000	0,066
10	ICBP	2016	Rp 3.631.301.000.000	Rp 28.901.948.000.000	0,126
11	INDF	2016	Rp 5.266.906.000.000	Rp 82.174.515.000.000	0,064
12	KLBF	2016	Rp 2.350.884.933.551	Rp 15.226.009.210.657	0,154
13	TLKM	2016	Rp 29.172.000.000.000	Rp 179.611.000.000.000	0,162
14	UNTR	2016	Rp 5.104.477.000.000	Rp 63.991.229.000.000	0,080
15	UNVR	2016	Rp 6.390.672.000.000	Rp 16.745.695.000.000	0,382
16	WIKA	2016	Rp 1.147.144.922.000	Rp 31.096.539.490.000	0,037
17	AKRA	2017	Rp 1.304.600.520.000	Rp 16.823.208.531.000	0,078
18	ICBP	2017	Rp 3.543.173.000.000	Rp 31.619.514.000.000	0,112
19	INDF	2017	Rp 5.097.264.000.000	Rp 88.400.877.000.000	0,058
20	KLBF	2017	Rp 2.453.251.410.604	Rp 16.616.239.416.335	0,148
21	TLKM	2017	Rp 32.701.000.000.000	Rp 198.484.000.000.000	0,165
22	UNTR	2017	Rp 7.673.322.000.000	Rp 82.262.093.000.000	0,093
23	UNVR	2017	Rp 7.004.562.000.000	Rp 18.906.413.000.000	0,370
24	WIKA	2017	Rp 1.356.115.489.000	Rp 45.683.774.302.000	0,030
25	AKRA	2018	Rp 1.596.652.821.000	Rp 19.940.850.599.000	0,080
26	ICBP	2018	Rp 4.658.781.000.000	Rp 34.367.153.000.000	0,136
27	INDF	2018	Rp 4.961.851.000.000	Rp 96.537.796.000.000	0,051

28	**KLBF**	**2018**	Rp	2.497.261.964.757	Rp	18.146.206.145.369	0,138
29	**TLKM**	**2018**	Rp	26.979.000.000.000	Rp	206.196.000.000.000	0,131
30	**UNTR**	**2018**	Rp	11.498.409.000.000	Rp	116.281.017.000.000	0,099
31	**UNVR**	**2018**	Rp	9.081.187.000.000	Rp	20.326.869.000.000	0,447
32	**WIKA**	**2018**	Rp	2.073.299.864.000	Rp	59.230.001.239.000	0,035
33	**AKRA**	**2019**	Rp	703.077.279.000	Rp	21.409.046.173.000	0,033
34	**ICBP**	**2019**	Rp	5.360.029.000.000	Rp	38.709.314.000.000	0,138
35	**INDF**	**2019**	Rp	5.902.729.000.000	Rp	96.198.559.000.000	0,061
36	**KLBF**	**2019**	Rp	2.537.601.823.645	Rp	20.264.726.862.584	0,125
37	**TLKM**	**2019**	Rp	27.592.000.000.000	Rp	221.208.000.000.000	0,125
38	**UNTR**	**2019**	Rp	11.134.641.000.000	Rp	111.713.375.000.000	0,100
39	**UNVR**	**2019**	Rp	7.392.837.000.000	Rp	20.649.371.000.000	0,358
40	**WIKA**	**2019**	Rp	2.621.015.140.000	Rp	62.110.847.154.000	0,042
41	**AKRA**	**2020**	Rp	961.997.313.000	Rp	18.683.572.815.000	0,051
42	**ICBP**	**2020**	Rp	7.418.574.000.000	Rp	103.588.325.000.000	0,072
43	**INDF**	**2020**	Rp	8.752.066.000.000	Rp	163.136.516.000.000	0,054
44	**KLBF**	**2020**	Rp	2.799.622.515.814	Rp	22.564.300.317.374	0,124
45	**TLKM**	**2020**	Rp	29.563.000.000.000	Rp	246.943.000.000.000	0,120
46	**UNTR**	**2020**	Rp	5.632.425.000.000	Rp	99.800.963.000.000	0,056
47	**UNVR**	**2020**	Rp	7.163.536.000.000	Rp	20.534.632.000.000	0,349
48	**WIKA**	**2020**	Rp	322.342.513.000	Rp	68.109.185.213.000	0,005

Lampiran 2

Data Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE)

No	**Nama Perusahaan**	**Tahun**	**Total Aset**		**SIZE**
1	**AKRA**	**2015**	Rp	15.203.129.563.000	30,353
2	**ICBP**	**2015**	Rp	26.560.624.000.000	30,910
3	**INDF**	**2015**	Rp	91.831.526.000.000	32,151
4	**KLBF**	**2015**	Rp	13.696.417.381.439	30,248
5	**TLKM**	**2015**	Rp	166.173.000.000.000	32,744
6	**UNTR**	**2015**	Rp	61.715.399.000.000	31,754
7	**UNVR**	**2015**	Rp	15.729.945.000.000	30,387

8	**WIKA**	**2015**	Rp	19.602.406.034.000	30,607
9	**AKRA**	**2016**	Rp	15.830.740.710.000	30,393
10	**ICBP**	**2016**	Rp	28.901.948.000.000	30,995
11	**INDF**	**2016**	Rp	82.174.515.000.000	32,040
12	**KLBF**	**2016**	Rp	15.226.009.210.657	30,354
13	**TLKM**	**2016**	Rp	179.611.000.000.000	32,822
14	**UNTR**	**2016**	Rp	63.991.229.000.000	31,790
15	**UNVR**	**2016**	Rp	16.745.695.000.000	30,449
16	**WIKA**	**2016**	Rp	31.096.539.490.000	31,068
17	**AKRA**	**2017**	Rp	16.823.208.531.000	30,454
18	**ICBP**	**2017**	Rp	31.619.514.000.000	31,085
19	**INDF**	**2017**	Rp	88.400.877.000.000	32,113
20	**KLBF**	**2017**	Rp	16.616.239.416.335	30,441
21	**TLKM**	**2017**	Rp	198.484.000.000.000	32,922
22	**UNTR**	**2017**	Rp	82.262.093.000.000	32,041
23	**UNVR**	**2017**	Rp	18.906.413.000.000	30,571
24	**WIKA**	**2017**	Rp	45.683.774.302.000	31,453
25	**AKRA**	**2018**	Rp	19.940.850.599.000	30,624
26	**ICBP**	**2018**	Rp	34.367.153.000.000	31,168
27	**INDF**	**2018**	Rp	96.537.796.000.000	32,201
28	**KLBF**	**2018**	Rp	18.146.206.145.369	30,529
29	**TLKM**	**2018**	Rp	206.196.000.000.000	32,960
30	**UNTR**	**2018**	Rp	116.281.017.000.000	32,387
31	**UNVR**	**2018**	Rp	20.326.869.000.000	30,643
32	**WIKA**	**2018**	Rp	59.230.001.239.000	31,712
33	**AKRA**	**2019**	Rp	21.409.046.173.000	30,695
34	**ICBP**	**2019**	Rp	38.709.314.000.000	31,287
35	**INDF**	**2019**	Rp	96.198.559.000.000	32,197
36	**KLBF**	**2019**	Rp	20.264.726.862.584	30,640
37	**TLKM**	**2019**	Rp	221.208.000.000.000	33,030
38	**UNTR**	**2019**	Rp	111.713.375.000.000	32,347
39	**UNVR**	**2019**	Rp	20.649.371.000.000	30,659
40	**WIKA**	**2019**	Rp	62.110.847.154.000	31,760

41	**AKRA**	**2020**	Rp	18.683.572.815.000	30,559
42	**ICBP**	**2020**	Rp	103.588.325.000.000	32,271
43	**INDF**	**2020**	Rp	163.136.516.000.000	32,726
44	**KLBF**	**2020**	Rp	22.564.300.317.374	30,747
45	**TLKM**	**2020**	Rp	246.943.000.000.000	33,140
46	**UNTR**	**2020**	Rp	99.800.963.000.000	32,234
47	**UNVR**	**2020**	Rp	20.534.632.000.000	30,653
48	**WIKA**	**2020**	Rp	68.109.185.213.000	31,852

Lampiran 3

Data Variabel Kepemilikan Institusional

No	Nama Perusahaan	Tahun	Kepemilikan Institusional
1	**AKRA**	**2015**	59,17
2	**ICBP**	**2015**	80,53
3	**INDF**	**2015**	50,07
4	**KLBF**	**2015**	56,68
5	**TLKM**	**2015**	60,86
6	**UNTR**	**2015**	59,50
7	**UNVR**	**2015**	85,00
8	**WIKA**	**2015**	65,05
9	**AKRA**	**2016**	58,58
10	**ICBP**	**2016**	80,53
11	**INDF**	**2016**	50,07
12	**KLBF**	**2016**	56,50
13	**TLKM**	**2016**	59,16
14	**UNTR**	**2016**	59,50
15	**UNVR**	**2016**	85,00
16	**WIKA**	**2016**	65,05
17	**AKRA**	**2017**	58,47
18	**ICBP**	**2017**	80,53
19	**INDF**	**2017**	50,07
20	**KLBF**	**2017**	56,77

21	**TLKM**	**2017**	58,23
22	**UNTR**	**2017**	59,50
23	**UNVR**	**2017**	85,00
24	**WIKA**	**2017**	65,05
25	**AKRA**	**2018**	58,51
26	**ICBP**	**2018**	80,53
27	**INDF**	**2018**	50,07
28	**KLBF**	**2018**	56,97
29	**TLKM**	**2018**	57,08
30	**UNTR**	**2018**	59,50
31	**UNVR**	**2018**	85,00
32	**WIKA**	**2018**	65,05
33	**AKRA**	**2019**	59,01
34	**ICBP**	**2019**	80,53
35	**INDF**	**2019**	50,07
36	**KLBF**	**2019**	56,96
37	**TLKM**	**2019**	56,74
38	**UNTR**	**2019**	59,50
39	**UNVR**	**2019**	85,00
40	**WIKA**	**2019**	65,05
41	**AKRA**	**2020**	59,01
42	**ICBP**	**2020**	80,53
43	**INDF**	**2020**	50,07
44	**KLBF**	**2020**	57,06
45	**TLKM**	**2020**	55,97
46	**UNTR**	**2020**	59,50
47	**UNVR**	**2020**	85,00
48	**WIKA**	**2020**	65,04

Lampiran 4

Data Variabel Proporsi Komisaris Independen

No	Nama Perusahaan	Tahun	Jumlah Komisaris Independen	Total Komisaris Perusahaan	PKI
1	**AKRA**	**2015**	1	4	0,250
2	**ICBP**	**2015**	3	6	0,500
3	**INDF**	**2015**	3	8	0,375
4	**KLBF**	**2015**	3	7	0,429
5	**TLKM**	**2015**	3	7	0,429
6	**UNTR**	**2015**	2	6	0,333
7	**UNVR**	**2015**	4	5	0,800
8	**WIKA**	**2015**	2	7	0,286
9	**AKRA**	**2016**	1	4	0,250
10	**ICBP**	**2016**	3	6	0,500
11	**INDF**	**2016**	3	8	0,375
12	**KLBF**	**2016**	3	7	0,429
13	**TLKM**	**2016**	3	7	0,429
14	**UNTR**	**2016**	2	6	0,333
15	**UNVR**	**2016**	4	5	0,800
16	**WIKA**	**2016**	2	6	0,333
17	**AKRA**	**2017**	1	3	0,333
18	**ICBP**	**2017**	3	6	0,500
19	**INDF**	**2017**	3	8	0,375
20	**KLBF**	**2017**	3	7	0,429
21	**TLKM**	**2017**	4	7	0,571
22	**UNTR**	**2017**	2	6	0,333
23	**UNVR**	**2017**	4	5	0,800
24	**WIKA**	**2017**	2	6	0,333
25	**AKRA**	**2018**	1	3	0,333
26	**ICBP**	**2018**	3	6	0,500
27	**INDF**	**2018**	3	8	0,375
28	**KLBF**	**2018**	2	6	0,333

29	**TLKM**	**2018**	3	7	0,429
30	**UNTR**	**2018**	2	6	0,333
31	**UNVR**	**2018**	4	5	0,800
32	**WIKA**	**2018**	3	7	0,429
33	**AKRA**	**2019**	1	3	0,333
34	**ICBP**	**2019**	3	6	0,500
35	**INDF**	**2019**	3	8	0,375
36	**KLBF**	**2019**	3	7	0,429
37	**TLKM**	**2019**	4	6	0,667
38	**UNTR**	**2019**	2	6	0,333
39	**UNVR**	**2019**	4	5	0,800
40	**WIKA**	**2019**	3	7	0,429
41	**AKRA**	**2020**	1	3	0,333
42	**ICBP**	**2020**	3	6	0,500
43	**INDF**	**2020**	3	8	0,375
44	**KLBF**	**2020**	3	7	0,429
45	**TLKM**	**2020**	4	9	0,444
46	**UNTR**	**2020**	2	6	0,333
47	**UNVR**	**2020**	5	6	0,833
48	**WIKA**	**2020**	3	7	0,429

Lampiran 5

Data Variabel Komite Audit

No	Nama Perusahaan	Tahun	Jumlah Komite Audit
1	**AKRA**	**2015**	3
2	**ICBP**	**2015**	3
3	**INDF**	**2015**	3
4	**KLBF**	**2015**	3
5	**TLKM**	**2015**	4
6	**UNTR**	**2015**	3
7	**UNVR**	**2015**	3

8	**WIKA**	**2015**	5
9	**AKRA**	**2016**	3
10	**ICBP**	**2016**	3
11	**INDF**	**2016**	3
12	**KLBF**	**2016**	3
13	**TLKM**	**2016**	6
14	**UNTR**	**2016**	3
15	**UNVR**	**2016**	3
16	**WIKA**	**2016**	4
17	**AKRA**	**2017**	3
18	**ICBP**	**2017**	3
19	**INDF**	**2017**	3
20	**KLBF**	**2017**	3
21	**TLKM**	**2017**	6
22	**UNTR**	**2017**	3
23	**UNVR**	**2017**	3
24	**WIKA**	**2017**	4
25	**AKRA**	**2018**	3
26	**ICBP**	**2018**	3
27	**INDF**	**2018**	3
28	**KLBF**	**2018**	3
29	**TLKM**	**2018**	5
30	**UNTR**	**2018**	3
31	**UNVR**	**2018**	3
32	**WIKA**	**2018**	5
33	**AKRA**	**2019**	3
34	**ICBP**	**2019**	3
35	**INDF**	**2019**	3
36	**KLBF**	**2019**	3
37	**TLKM**	**2019**	5
38	**UNTR**	**2019**	3
39	**UNVR**	**2019**	3
40	**WIKA**	**2019**	5

41	**AKRA**	**2020**	3
42	**ICBP**	**2020**	3
43	**INDF**	**2020**	3
44	**KLBF**	**2020**	3
45	**TLKM**	**2020**	7
46	**UNTR**	**2020**	3
47	**UNVR**	**2020**	3
48	**WIKA**	**2020**	6

Lampiran 6

Data Variabel *Tax Avoidance* (CETR)

No	Nama Perusahaan	Tahun	Beban Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak	CETR
1	**AKRA**	**2015**	Rp 233.173.876.000	Rp 1.291.914.896.000	0,180
2	**ICBP**	**2015**	Rp 1.086.486.000.000	Rp 4.009.634.000.000	0,271
3	**INDF**	**2015**	Rp 1.730.371.000.000	Rp 4.962.084.000.000	0,349
4	**KLBF**	**2015**	Rp 663.186.962.586	Rp 2.720.881.244.459	0,244
5	**TLKM**	**2015**	Rp 8.025.000.000.000	Rp 31.342.000.000.000	0,256
6	**UNTR**	**2015**	Rp 1.400.307.000.000	Rp 4.192.746.000.000	0,334
7	**UNVR**	**2015**	Rp 1.977.685.000.000	Rp 7.829.490.000.000	0,253
8	**WIKA**	**2015**	Rp 48.288.705.000	Rp 751.293.759.000	0,064
9	**AKRA**	**2016**	Rp 71.694.759.000	Rp 1.118.546.845.000	0,064
10	**ICBP**	**2016**	Rp 1.357.953.000.000	Rp 4.989.254.000.000	0,272
11	**INDF**	**2016**	Rp 2.532.747.000.000	Rp 7.385.228.000.000	0,343
12	**KLBF**	**2016**	Rp 740.303.526.679	Rp 3.091.188.460.230	0,239
13	**TLKM**	**2016**	Rp 9.017.000.000.000	Rp 38.189.000.000.000	0,236
14	**UNTR**	**2016**	Rp 1.625.553.000.000	Rp 6.730.030.000.000	0,242
15	**UNVR**	**2016**	Rp 2.181.213.000.000	Rp 8.571.885.000.000	0,254
16	**WIKA**	**2016**	Rp 83.345.393.000	Rp 1.230.490.315.000	0,068
17	**AKRA**	**2017**	Rp 125.094.198.000	Rp 1.126.408.644.000	0,111
18	**ICBP**	**2017**	Rp 1.663.388.000.000	Rp 5.206.561.000.000	0,319
19	**INDF**	**2017**	Rp 2.497.558.000.000	Rp 7.594.882.000.000	0,329
20	**KLBF**	**2017**	Rp 787.935.315.388	Rp 3.241.186.725.992	0,243

21	**TLKM**	**2017**	Rp	9.958.000.000.000	Rp	42.659.000.000.000	0,233
22	**UNTR**	**2017**	Rp	2.849.335.000.000	Rp	10.522.657.000.000	0,271
23	**UNVR**	**2017**	Rp	2.367.099.000.000	Rp	9.371.661.000.000	0,253
24	**WIKA**	**2017**	Rp	106.275.869.000	Rp	1.462.391.358.000	0,073
25	**AKRA**	**2018**	Rp	204.739.828.000	Rp	868.080.622.000	0,236
26	**ICBP**	**2018**	Rp	1.788.004.000.000	Rp	6.446.785.000.000	0,277
27	**INDF**	**2018**	Rp	2.485.115.000.000	Rp	7.446.966.000.000	0,334
28	**KLBF**	**2018**	Rp	809.137.704.264	Rp	3.306.399.669.021	0,245
29	**TLKM**	**2018**	Rp	9.426.000.000.000	Rp	36.405.000.000.000	0,259
30	**UNTR**	**2018**	Rp	4.210.310.000.000	Rp	15.708.719.000.000	0,268
31	**UNVR**	**2018**	Rp	3.066.900.000.000	Rp	12.148.087.000.000	0,252
32	**WIKA**	**2018**	Rp	285.329.070.000	Rp	2.358.628.934.000	0,121
33	**AKRA**	**2019**	Rp	165.884.121.000	Rp	865.379.704.000	0,192
34	**ICBP**	**2019**	Rp	2.076.943.000.000	Rp	7.436.972.000.000	0,279
35	**INDF**	**2019**	Rp	2.846.668.000.000	Rp	8.749.397.000.000	0,325
36	**KLBF**	**2019**	Rp	865.015.000.888	Rp	3.402.616.824.533	0,254
37	**TLKM**	**2019**	Rp	10.316.000.000.000	Rp	37.908.000.000.000	0,272
38	**UNTR**	**2019**	Rp	4.342.244.000.000	Rp	15.476.885.000.000	0,281
39	**UNVR**	**2019**	Rp	2.508.935.000.000	Rp	9.901.772.000.000	0,253
40	**WIKA**	**2019**	Rp	168.240.548.000	Rp	2.789.255.688.000	0,060
41	**AKRA**	**2020**	Rp	229.719.593.000	Rp	1.191.716.906.000	0,193
42	**ICBP**	**2020**	Rp	2.540.073.000.000	Rp	9.958.647.000.000	0,255
43	**INDF**	**2020**	Rp	3.674.268.000.000	Rp	12.426.334.000.000	0,296
44	**KLBF**	**2020**	Rp	828.010.058.930	Rp	3.627.632.574.744	0,228
45	**TLKM**	**2020**	Rp	9.212.000.000.000	Rp	38.775.000.000.000	0,238
46	**UNTR**	**2020**	Rp	1.378.761.000.000	Rp	7.011.186.000.000	0,197
47	**UNVR**	**2020**	Rp	2.043.333.000.000	Rp	9.206.869.000.000	0,222
48	**WIKA**	**2020**	Rp	-	Rp	310.275.688.000	0,000

Lampiran 7

Sampel yang Digunakan

No	Nama Perusahaan	Tahun	ROA (X1)	SIZE (X2)	Kepemilikan Institusional (X3)	PKI (X4)	Jumlah Komite Audit (X5)	CETR (Y)
1	**AKRA**	**2015**	0,070	30,353	59,17	0,250	3	0,180
2	**ICBP**	**2015**	0,110	30,910	80,53	0,500	3	0,271
3	**INDF**	**2015**	0,040	32,151	50,07	0,375	3	0,349
4	**KLBF**	**2015**	0,150	30,248	56,68	0,429	3	0,244
5	**TLKM**	**2015**	0,140	32,744	60,86	0,429	4	0,256
6	**UNTR**	**2015**	0,045	31,754	59,50	0,333	3	0,334
7	**UNVR**	**2015**	0,372	30,387	85,00	0,800	3	0,253
8	**WIKA**	**2015**	0,036	30,607	65,05	0,286	5	0,064
9	**AKRA**	**2016**	0,066	30,393	58,58	0,250	3	0,064
10	**ICBP**	**2016**	0,126	30,995	80,53	0,500	3	0,272
11	**INDF**	**2016**	0,064	32,040	50,07	0,375	3	0,343
12	**KLBF**	**2016**	0,154	30,354	56,50	0,429	3	0,239
13	**TLKM**	**2016**	0,162	32,822	59,16	0,429	6	0,236
14	**UNTR**	**2016**	0,080	31,790	59,50	0,333	3	0,242
15	**UNVR**	**2016**	0,382	30,449	85,00	0,800	3	0,254
16	**WIKA**	**2016**	0,037	31,068	65,05	0,333	4	0,068
17	**AKRA**	**2017**	0,078	30,454	58,47	0,333	3	0,111
18	**ICBP**	**2017**	0,112	31,085	80,53	0,500	3	0,319
19	**INDF**	**2017**	0,058	32,113	50,07	0,375	3	0,329
20	**KLBF**	**2017**	0,148	30,441	56,77	0,429	3	0,243
21	**TLKM**	**2017**	0,165	32,922	58,23	0,571	6	0,233
22	**UNTR**	**2017**	0,093	32,041	59,50	0,333	3	0,271
23	**UNVR**	**2017**	0,370	30,571	85,00	0,800	3	0,253
24	**WIKA**	**2017**	0,030	31,453	65,05	0,333	4	0,073
25	**AKRA**	**2018**	0,080	30,624	58,51	0,333	3	0,236
26	**ICBP**	**2018**	0,136	31,168	80,53	0,500	3	0,277
27	**INDF**	**2018**	0,051	32,201	50,07	0,375	3	0,334
28	**KLBF**	**2018**	0,138	30,529	56,97	0,333	3	0,245

29	**TLKM**	**2018**	0,131	32,960	57,08	0,429	5	0,259
30	**UNTR**	**2018**	0,099	32,387	59,50	0,333	3	0,268
31	**UNVR**	**2018**	0,447	30,643	85,00	0,800	3	0,252
32	**WIKA**	**2018**	0,035	31,712	65,05	0,429	5	0,121
33	**AKRA**	**2019**	0,033	30,695	59,01	0,333	3	0,192
34	**ICBP**	**2019**	0,138	31,287	80,53	0,500	3	0,279
35	**INDF**	**2019**	0,061	32,197	50,07	0,375	3	0,325
36	**KLBF**	**2019**	0,125	30,640	56,96	0,429	3	0,254
37	**TLKM**	**2019**	0,125	33,030	56,74	0,667	5	0,272
38	**UNTR**	**2019**	0,100	32,347	59,50	0,333	3	0,281
39	**UNVR**	**2019**	0,358	30,659	85,00	0,800	3	0,253
40	**WIKA**	**2019**	0,042	31,760	65,05	0,429	5	0,060
41	**AKRA**	**2020**	0,051	30,559	59,01	0,333	3	0,193
42	**ICBP**	**2020**	0,072	32,271	80,53	0,500	3	0,255
43	**INDF**	**2020**	0,054	32,726	50,07	0,375	3	0,296
44	**KLBF**	**2020**	0,124	30,747	57,06	0,429	3	0,228
45	**TLKM**	**2020**	0,120	33,140	55,97	0,444	7	0,238
46	**UNTR**	**2020**	0,056	32,234	59,50	0,333	3	0,197
47	**UNVR**	**2020**	0,349	30,653	85,00	0,833	3	0,222
48	**WIKA**	**2020**	0,005	31,852	65,04	0,429	6	0,000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

6. Data Pribadi

Nama	: Desi Puspitasari Setianingsih
Tempat dan Tanggal Lahir	: Karawang, 11 Desember 1999
Alamat	: Perum Pangulah Permai RT 003 RW 009, Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Nomor Hp	: 085775644525
Email	: desipuspitasarisetianingsih@gmail.com

7. Jenjang Pendidikan

- SD Negeri Pangulah Selatan II
- MTs Negeri 2 Karawang
- SMA Negeri 1 Cikampek

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Juni 2021

Desi Puspitasari Setianingsih

NIM. 1705046100